

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN TINGKAT PENGHASILAN
MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN
PERDESAAN (PBB-P2)**

(Studi kasus: Pada Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang)

SKRIPSI



Nama : Reza Darmawan

NIM : 22 2011 321

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2015

**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN TINGKAT PENGHASILAN
MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN
PERDESAAN (PBB-P2)**

(Studi kasus: Pada Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Nama : Reza Darmawan

NIM : 22 2011 321

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

2015

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Reza Darmawan

NIM : 22 2011 321

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang , September 2015

Penulis



Reza Darmawan

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Tingkat Penghasilan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) (Studi Kasus Pada Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang)
Nama : Reza Darmawan
Nim : 22.2011.321
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal..... 9 September 2015

Pembimbing


M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si
NIDN/NBM:0204076802/843951

Mengetahui,
Dekan
U.b. Ketua Program Studi Akuntansi


Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si
NIDN : 0228115802/1021961

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- ❖ *"Barangsiapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya dan sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusan (yang dikehendaki)-Nya" (QS. Ath- Thalaq: 3)*
- ❖ *"Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan sebaliknya jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri pula" (QS. Al- Isra': 7)*

PERSEMBAHAN:

Kupersembahkan kepada:

- ❖ *Ayah dan Ibu Tercinta.*
- ❖ *Saudara-saudaraku Tercinta*
- ❖ *Bapak M. Orba Kurniawan S.E.,S.H.,M.Si*
- ❖ *Rani Sugiarti*
- ❖ *Almamaterku*



Assalammu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirobbil A'lamiiin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ” **Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Tingkat Penghasilan Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) (Studi kasus pada Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang)**” yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 (Satu) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Shalawat serta salam tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. yang selalu berjuang tanpa kenal lelah untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan, walaupun halangan dan rintangan diterimanya dalam memperjuangkan agama yang Haq.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga tak luput dari berbagai masalah dan menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun sebagaimana mestinya tanpa ada bimbingan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu hingga terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang telah mendidik, memberi kasih sayang berlimpah, mengorbankan banyak hal, dan memberi semangat serta do'a yang tiada henti-hentinya demi suksesnya kehidupan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak M. Orba Kurniawan S.E.,S.H.,M.Si yang telah sabar mendidik, membimbing, mengarahkan dan memberi saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis

juga menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak H.M.Idris, S.E.,M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang serta Staf.
2. Bapak Abid Djazuli, S.E.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Rosalina Ghazali, S.E Ak.,M.si selaku Ketua Jurusan dan Pembimbing Akademik, dan Ibu Welly, S.E.,M.Si selaku selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang atas bantuan dan perhatiannya kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang telah membantu penulis dalam pengambilan data.
6. Kantor Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk membagikan kuesioner.
7. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih sebesar-besarnya karena sudah membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. membalas semua kebaikan kalian yang telah membantu dengan tulus dan ikhlas. Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Aamin.

Wassalammualaikum Wr.Wb

Palembang, September 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PRAKATA.....	vi
DAFTAR ISI.....	i x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
A. Penelitian Sebelumnya.....	9
B. Landasan Teori	12

1. Dasar-Dasar Perpajakan.....	12
a. Definisi Pajak	12
b. Fungsi Pajak	13
c. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan.....	13
d. Sistem Pemungutan Pajak	14
2. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.....	14
a. Definisi PBB-P2.....	14
b. Latar Belakang Pengalihan PBB-P2 Menjadi Pajak Daerah	15
c. Objek PBB-P2	18
d. Objek Pajak Yang Tidak Dikenakan PBB-P2.....	18
e. NJOPTKP.....	19
f. Subjek dan Wajib Pajak PBB-P2	19
g. NJOP	20
h. Tarif PBB-P2.....	20
i. SPOP	20
j. Prosedur Pembayaran PBB-P2.....	21
3. Pengertian Tingkat Pendidikan	22
4. Tingkat Penghasilan.....	24
a. Pengertian Penghasilan	24
b. Sumber Penghasilan	25
c. Tingkat Penghasilan	26
5. Kepatuhan Wajib Pajak.....	27

a.	Definisi Kepatuhan Wajib Pajak.....	27
b.	Jenis Kepatuhan Wajib Pajak.....	29
c.	Kategori Kepatuhan Wajib Pajak.....	30
6.	Hipotesis	31
BAB III	METODE PENELITIAN.....	32
A.	Jenis Penelitian	32
B.	Lokasi Penelitian	33
C.	Operasionalisasi Variabel	33
D.	Populasi dan Sampel.....	34
E.	Data Yang Diperlukan	36
F.	Metode Pengumpulan Data.....	36
G.	Analisis Data dan Teknik Analisis	37
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A.	Hasil Penelitian.....	49
1.	Gambaran Umum Kecamatan Ilir Barat II.....	49
2.	Struktur Organisasi	50
3.	Tugas Pokok Masing-masing Jabatan.....	50
4.	Gambaran Umum Responden	58
5.	Deskriptif Data Hasil Penelitian	59
6.	Analisis Deskriptif Tingkat Pendidikan.....	60
7.	Analisis Deskriptif Tingkat Penghasilan	61
8.	Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak	62
9.	Gambaran Karakteristik Variabel	63

10. Pengujian Validitas dan Reabilitas Data	66
a. Uji Validitas	66
1) Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 (Y)	67
b. Uji Reabilitas	68
11. Uji Asumsi Klasik.....	69
a. Uji Normalitas.....	69
b. Uji Autokorelasi.....	70
c. Uji Multikolinieritas.....	71
d. Uji Heteroskedastisitas.....	72
12. Analisis Regresi Linier Berganda	74
a. Pengaruh Konstanta	75
b. Pengaruh Tingkat Pendidikan (X1) Secara Parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	75
c. Pengaruh Tingkat Penghasilan (X2) Secara Parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	75
13. Koefisien Determinasi (Adjusted R Square).....	72
14. Pengujian Hipotesisi	75
a. Pengujian Hipotesisi Secara Bersama (Uji F).....	76
b. Uji Hipotesisi Secara Parsial/ individual (Uji t)	77
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	76
1. Pengaruh Tingkat Pendidikan Secara Simultan terhadap Kepatuhan wajib Pajak PBB-P2	79

2. Pengaruh Tingkat Pendidikan Secara Parsial terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2	81
3. Pengaruh Tingkat Penghasilan Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2	82
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	84
A. Simpulan.....	84
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	85

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Penerimaan PBB-P2	5
Tabel I.2	Laporan Wajib Pajak PBB-P2	5
Tabel II.1	Penelitian Sebelumnya	12
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel.....	33
Tabel III.2	Populasi Penelitian	34
Tabel III.3	Sampel Penelitian.....	35
Tabel IV.1	Persebaran Penduduk Kecamatan Ilir Barat II.....	49
Tabel IV.2	Karakteristik Responden	58
Tabel IV.3	Jumlah Sampel di Kecamatan Ilir Barat II.....	59
Tabel IV.4	Data Deskriptif Variabel Tingkat Pendidikan.....	60
Tabel IV.5	Data Analisis Deskriptif Tingkat Penghasilan	61
Tabel IV.6	Data Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak	62
Tabel IV.7	Rekapitulasi Hasil Data Jawaban Responden	63
Tabel IV.8	Hasil Pengujian Validitas Variabel Kepatuhan wajib pajak	67
Tabel IV.9	Hasil Uji Reliabilitas.....	68
Tabel IV.10	Hasil Pengujian Autokorelasi	71
Tabel IV.11	Hasil Pengujian Multikolinieritas	72
Tabel IV.12	Hasil Uji Regresi.....	74
Tabel IV.13	Koefisien Determinasi	76

Tabel IV.14 Hasil Uji F.....	77
Tabel IV.15 Hasil Uji t.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Gambar Hasil Output SPSS Uji Normalitas (Normal P-P plot).....	70
Gambar IV.2	Gambar Hasil Output SPSS Uji Heterokedastisitas (<i>Scatter Plot</i>)	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner Pengaruh Karkteristik Wajib Pajak	89
Lampiran 2	Hasil Total Jawaban Responden	92
Lampiran 3	Hasil Olah SPSS	98
Lampiran 4	Persetujuan Perbaikan Skripsi	99
Lampiran 5	Surat Izin Riset	100
Lampiran 6	Surat Keterangan Selesai Riset	101
Lampiran 7	Sertifikat Membaca Al-Qur'an	102
Lampiran 8	Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)	103
Lampiran 9	Sertifikat TOEFL	104
Lampiran 10	Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi	105
Lampiran 11	Biodata Penulis	106

ABSTRAK

Reza Darmawan/222011321/2015/Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Tingkat Penghasilan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) (Studi Kasus pada Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh tingkat pendidikan(X_1) dan tingkat penghasilan masyarakat (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) (Y) pada Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang secara parsial dan simultan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) pada Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang secara simultan dan Parsial.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian asosiatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang ada pada Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang. Teknik pengambilan sampel secara random sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan skunder. Analisis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan kualitatif.

Hasil Penelitian ini secara parsial adalah pada variabel tingkat pendidikan terdapat pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan, pada variabel tingkat penghasilan terdapat pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan. Secara simultan terdapat pengaruh secara signifikan antara tingkat pendidikan dan penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)

Kata Kunci : Tingkat pendidikan, tingkat penghasilan masyarakat, kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan PBB-P2

ABSTRACT

Reza Darmawan / 222011321/2015 / Effect of Education and Income Level Community Against Taxpayer Compliance in the Pay Tax on Land and Building Urban and Rural (PBB-P2) (Case Study in District of Ilir Barat II Palembang.)

Formulation of the problem in this research is how the influence of education level (X1) and income levels of society (X2) on tax compliance in paying taxes Land and Building Urban and Rural (PBB-P2) (Y) in the District of West ilir II Palembang partially and simultaneous. The purpose of this study was to influence determines the level of education and income levels of society on tax compliance in paying tax on land and buildings Urban and Rural (PBB-P2) in the District of Ilir Barat II Palembang simultaneously and Partial.

This research was conducted in the District of Ilir Barat II Palembang. This type of research used in this research is associative research. The population used in this study is the taxpayer who is on the District Ilir Barat II Palembang. Mechanical sampling random sampling. The analysis technique used adalag multiple linear regression. The data used in this study are primary and secondary data. Analysis of the data used is data kuantitatif and qualitative.

This research was partially the result is the variable level of education there is a significant influence on tax compliance Land and Building Urban and Rural, the variable income levels are significantly influence on tax compliance Land and Building Urban and Rural. Simultaneously there is a significant influence antara level of education and income on tax compliance Land and Building Urban and Rural (PBB-P2)

Keywords: *level of education, income levels of society, taxpayer compliance Land and Building Urban and Rural PBB-P2*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia yang terdiri dari 13.487 jumlah penduduk di indonesia tercatat sebanyak 237.641.326 (www.bps.go.id). Sehingga pada tahun 2010 Indonesia merupakan negara yang berpenduduk terbesar keempat di dunia. Besarnya jumlah penduduk di indonesia yang meningkat dari tahun ke tahun, maka kebutuhan bumi/tanah dan atau bangunan di indonesia akan meningkat. Sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Bab XIV Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagai warga negara indonesia, masyarakat berhak atas seluruh isi bumi dan bangunan. Pengelolaan atas bumi/tanah dan atau bangunan sepenuhnya diserahkan kepada negara untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Negara membutuhkan biaya untuk mengelola bumi/tanah dan bangunan. Biaya yang dibutuhkan untuk pengelolaan tersebut bersumber dari pendapatan negara yang salah satunya bersumber dari pajak.

Pajak merupakan sektor penyumbang terbesar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oleh karena itu Wajib Pajak diharapkan sadar untuk membayar pajak. Pemerintah harus berupaya untuk mengelola pendapatan negara (pajak) dengan baik sehingga pemasukan pajak

memberikan hasil yang optimal. Untuk mendukung tujuan tersebut. Maka diperlukan peraturan-peraturan yang mendukung agar realisasi penerimaan pajak dapat tercapai.

Tujuan utama dari penerimaan negara adalah memungut pajak dan memastikan kewajiban pajak yang dibayar sudah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan dan pelaksanaannya harus mengikuti sistem pemungutan pajak dan sistem administrasi. Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem *self assesment*. Sistem *self assesment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Casavera, 2009: 3). Dengan adanya sistem *self assesment* diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Bumi meliputi permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contoh : sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dll. Bangunan meliputi Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Contoh : rumah tempat tinggal, bangunan tempat

usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, emplasemen, pagar mewah, dermaga, taman mewah, fasilitas lain yang memberi manfaat, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dll.

Peralihan penerimaan PBB dari pajak pusat ke pajak daerah, menjadikan pemerintah Daerah harus mempersiapkan diri untuk mengelola sendiri PBB dalam sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2). Hal-hal yang dipersiapkan antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), biaya, serta teknologi yang dibutuhkan. penerimaan PBB-P2 sepenuhnya akan menjadi milik Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) yang akan digunakan sebagai pembiayaan umum suatu daerah. Alokasi dana yang bersumber dari Penerimaan PBB tersebut akan dikembalikan lagi kepada daerah sehingga masyarakat atau Wajib Pajak memperoleh manfaat atas kewajiban dalam membayar pajak. Dalam hal ini masyarakat memperoleh umpan balik atau *feedback* atas pembayaran PBB. Manfaat yang dapat di rasakan oleh masyarakat adalah alokasi dana tersebut dipergunakan untuk membiayai keperluan daerah dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, serta pembangunan atau infrastruktur semua daerah. Sehingga peran PBB daerah sangat vital yang berarti PBB merupakan “jantung” dalam pembangunan suatu daerah.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam PBB adalah sistem pemungutan *official Assessment System* dimana fiskus yang lebih pro aktif dan kooperatif melakukan perhitungan dan penetapan pajak yang terutang. Fiskus akan menetapkan besarnya PBB dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB yang pada akhirnya akan didistribusikan kepada wajib

pajak. Dengan adanya official assessment system pada pengenaan PBB, kesadaran Wajib Pajak pada realisasinya cenderung akan menghasilkan hasil yang positif. Fakta yang terjadi, kewenangan yang diberikan tidak sepenuhnya dijalankan oleh WP Pribadi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, justru membuat wajib pajak orang pribadi menjadi lebih mudah untuk menyelewengkan kewajiban perpajakannya.

Faktor penghasilan dan faktor pengetahuan merupakan dua hal yang sangat penting untuk faktor pendukung kepatuhan bagi Wajib Pajak. Faktor penghasilan dijadikan salah sebagai salah satu alasan Wajib Pajak tidak patuh. Seperti yang diungkapkan oleh nurmanto (2003: 149), bila seseorang bekerja dan menghasilkan uang, maka secara alamiah uang tersebut pertama-tama ditujukannya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya. Akan tetapi pada saat yang bersamaan jika Wajib Pajak telah memenuhi syarat-syarat tertentu maka kewajiban untuk membayar pajak kepada kas Negara. Hal tersebut akan menimbulkan konflik antara kepentingan diri sendiri dengan kepentingan Negara. Wajib Pajak akan terlebih dahulu memenuhi hidup mereka sebelum membayar pajak. Sehingga tingkat penghasilan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya.

Demikian pula dengan faktor pengetahuan, yang mempengaruhi faktor pengetahuan adalah pemahaman Wajib Pajak melalui pendidikan. Pengetahuan tersebut umumnya kita dapatkan disaat kita menjalani pendidikan formal. Amilin dann Yusronillah (2006) menjelaskan peranan

pendidikan dalam hal ini sebagai media dalam merubah mental masyarakat kearah yang positif. Oleh karena itu, pendidikan perpajakan harus mulai ditanamkan sejak dini khususnya di lingkungan sekolah. Agar anak-anak dan para orang tua yang berperan sebagai wajib pajak tahu akan pentingnya membayar pajak. Jika mereka sudah tahu akan kewajiban mereka maka membayar pajak pun akan terasa ringan.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah merupakan salah satu tempat wajib pajak membayar pajaknya daan sumber penerimaan pajak di kota palembang. Adapun data yang diperoleh dari dinas pendapatan daerah bahwa target dan realisasi Pajak bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) selama 3 tahun terakhir, sebagai berikut:

Tabel I.1
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan
(PBB-P2)
Periode 2012-2014

Tahun	Target	Realisasi	%
2012	1.229.206.767	880.233.250	71,6%
2013	1.170.978.033	907.769.788	77,5%
2014	1.192.207.293	974.265.264	82%

Sumber: *Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palembang*

Tabel I.2
Laporan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan
(PBB-P2)
Periode 2012-2014

Tahun	WP Terdaftar	WP Membayar	Persentase
2012	8.278	6.171	74,5%
2013	8.339	5.850	70,1%
2014	8.569	6.833	79,7%

Sumber: *Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota palembang*

Berdasarkan tabel I.1 dapat dilihat bahwa penerimaan di dinas pendapatan daerah kota Palembang selama tiga tahun terakhir belum pernah memenuhi target PBB-P2 yang telah ditetapkan. Hal ini berhubungan erat dengan kepatuhan wajib pajak dalam memasukan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Hal ini dapat dilihat pada tabel 2 diatas yang menunjukkan bahwa pada Dinas Pendapatan Daerah Palembang, hingga tahun 2014 terdapat 8.569 wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang terdaftar, namun hanya 6.833 WP OP yang menyampaikan SPT. Ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP OP di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang ini hanya 79,7% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian masalah ini dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Penghasilan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) (Studi kasus: Pada Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan masyarakat secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang?

2. Bagaimanakah pengaruh tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan masyarakat secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) Di Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan masyarakat secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui pengaruh dan tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan masyarakat secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Di Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pengaruh tingkat pendidikan dan penghasilan

masyarakat terhadap kesadaran pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan.

2. Bagi Kecamatan Ilir Barat II

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan serta memberikan masukan mengenai pentingnya pelaksanaan membayar pajak dalam meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan.

3. Bagi almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang berjudul Analisis Pengaruh Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan PBB Masyarakat Desa dan Kota Dengan Variabel Moderating kontrol Petugas Desa/kelurahan (Studi kasus Pada Kabupaten Demak) yang dilakukan oleh Carolla Dita Surya Putri (2013), rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah pengetahuan umum, tingkat ekonomi, dan pengetahuan pajak dari wajib pajak bumi dan bangunan di wilayah kabupaten demak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan PBB? Apakah kontrol petugas desa/kelurahan dapat memperkuat pengaruh antara pengetahuan umum, tingkat ekonomi, dan pengetahuan pajak dari wajib pajak di desa dan kota di wilayah kota demak terhadap kepatuhan PBB? Apakah terdapat perbedaan kepatuhan PBB antara wajib pajak bumi dan bangunan yang tinggal di daerah perdesaan dan perkotaan di wilayah kabupaten demak? Tujuan dalam penelitian ini adalah membuktikan secara empiris bahwa Pengetahuan Umum, tingkat ekonomi dan pengetahuan pajak dari wajib pajak di desa dan kota di wilayah kabupaten demak mempengaruhi kepatuhan pembayaran PBB, membuktikan secara empiris bahwa kontrol petugas desa/kelurahan dapat memperkuat pengaruh pengetahuan umum, tingkat ekonomi, dan pengetahuan pajak terhadap PBB, membuktikan secara empiris bahwa terdapat perbedaan

kepatuhan PBB antara wajib pajak bumi dan bangunan yang tinggal di daerah perdesaan dan perkotaan di wilayah kabupaten demak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian assosiatif. dan data yang digunakan adalah data primer. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengetahuan umum dan pengetahuan pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. sedangkan tingkat ekonomi dapat memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap kepatuhan PBB. Di sisi lain, adanya kontrol petugas desa/kelurahan dapat memperkuat pengaruh antara pengetahuan umum dan tingkat ekonomi terhadap kepatuhan PBB. Akan tetapi, kontrol tersebut justru memperlemah pengaruh dari pengetahuan pajak dan terhadap kepatuhan PBB.

Penelitian yang kedua yang berjudul pengaruh karakteristik pada wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB (studi kasus pada kantor pelayanan PBB Jakarta Selatan Satu) oleh Laily Fuziyah (2008). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor karakteristik pada wajib pajak seperti kesadaran perpajakan wajib pajak, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan wajib pajak, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan PBB, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi dan denda PBB, sikap wajib pajak terhadap fungsi pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB? Seberapa besar pengaruh faktor-faktor karakteristik pada wajib pajak seperti kesadaran perpajakan wajib pajak, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan wajib pajak, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan PBB, persepsi wajib

pajak tentang pelaksanaan sanksi dan denda PBB, sikap wajib pajak terhadap fungsi pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor-faktor karakteristik pada wajib pajak seperti kesadaran perpajakan wajib pajak, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan wajib pajak, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan PBB, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi dan denda PBB, sikap wajib pajak terhadap fungsi pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB, Yang kedua yaitu Seberapa besar pengaruh faktor-faktor karakteristik pada wajib pajak seperti kesadaran perpajakan wajib pajak, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan wajib pajak, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan PBB, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi dan denda PBB, sikap wajib pajak terhadap fungsi pajak berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian asosiatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa kesadaran perpajakan, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan denda PBB, sikap wajib pajak terhadap fungsi pajak berpengaruh positif terhadap keberhasilan penerimaan PBB.

Tabel II.1
Penelitian Sebelumnya

No	Judul, Nama dan tahun penelitian	Perbedaan dan persamaan
1	Analisis Pengaruh Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan PBB Masyarakat Desa dan Kota Dengan Variabel Moderating kontrol Petugas Desa/kelurahan (Studi kasus Pada Kabupaten Demak) oleh Carolla Dita Surya Putri (2013)	Perbedaan: penelitian sebelumnya dilakukan di kabupaten demak, dan Persamaan: sama-sama meneliti tentang pengetahuan umum, dan tingkat ekonomi terhadap kepatuhan PBB
2	pengaruh karakteristik pada wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB (studi kasus pada kantor pelayanan PBB Jakarta Selatan Satu) oleh Laily Fuziyah (2008)	Perbedaan: penelitian sebelumnya meneliti tentang karakteristik wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan PBB. Persamaan: sama-sama meneliti tentang pajak bumi dan bangunan

Sumber: Penulis, 2015

B. Landasan Teori

1. Dasar-dasar Perpajakan

a. Definisi Pajak

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung

dandigunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

b. Fungsi pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu :

1) Fungsi Budgetair

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya

2) Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2011: 1).

c. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Hukum yang mendasari Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1) Undang-undang dasar 1945

2) Undang-undang NO. 12 tahun 1985 yang diubah lagi pada Undang-undang NO. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

3) Peraturan Pemerintah NO.46 tahun 2000

4) Keputusan Menteri Keuangan NO.201/KMK.04/2000

5) KEP-251/PJ.6/200

d. Sistem Pemungutan Pajak

1) Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2) Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3) With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2011: 7-8)

2. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)

a. Definisi PBB-P2

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Bumi Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkantoran adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Sedangkan objek Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi kawasan

pertanian, perumahan, perkantoran, pertokoan, industri serta objek khusus perkotaan.

b. Latar Belakang Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah

Ditjen Perimbangan Keuangan (2014: 1-2) Pada tanggal 15 September 2009, telah disahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU 28/2009) antara lain untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha.

Hal yang paling fundamental dalam UU 28/2009 adalah dialihkannya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaandan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah. Pada awalnya PBB-P2 merupakan pajak yang proses administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat sedangkan seluruh penerimaannya dibagikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Namun, guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dari penerimaan PBB, maka

paling lambat tanggal 1 Januari 2014 seluruh proses pengelolaan PBB-P2 akan dilakukan oleh pemda. Sedangkan, PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap menjadi pajak pusat.

Adapun dasar pemikiran dan alasan pokok dari pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah, antara lain: *Pertama*, berdasarkan teori, PBB-P2 lebih bersifat lokal (*local origin*), visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (*immobile*), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut (*the benefit tax-link principle*). *Kedua*, pengalihan PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sekaligus memperbaiki struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). *Ketiga*, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat (*public services*), akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan PBB-P2. *Keempat*, berdasarkan praktek di banyak negara, PBB-P2 atau *Property Tax* termasuk dalam jenis *local tax*.

Berdasarkan Pasal 180 angka 5 UU 28/2009, masa transisi pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah adalah sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2013. Selama masa transisi tersebut, daerah yang telah siap dapat segera melakukan pemungutan PBB-P2 dengan terlebih dahulu menetapkan Peraturan daerah (Perda) tentang PBB-P2 sebagai dasar hukum pemungutan. Sebaliknya, apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 daerah

belum juga menetapkan Perda tentang PBB-P2, maka daerah tersebut tidak diperkenankan untuk melakukan pemungutan PBB-P2, dan bagi seluruh masyarakat di daerah yang bersangkutan tidak dibebani kewajiban untuk membayar PBB-P2.

Sementara itu, berdasarkan amanat Pasal 182 angka 1 UU 28/2009 dan guna mengatur tahapan persiapan pengalihan PBB-P2, maka pada tanggal 30 November 2010 telah ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah. Dalam peraturan bersama dimaksud diatur mengenai tugas dan tanggung jawab (Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan pemda), batas waktu penyerahan kompilasi data, batas waktu penyelesaian persiapan pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 oleh pemda, serta pemantauan dan pembinaan.

Namun demikian, setelah implementasi pengalihan PBB-P2 tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan antara lain data piutang, pelayanan PBB-P2 yang belum terselesaikan, dan mekanisme restitusi PBB-P2 yang pajaknya dibayar ketika dikelola Pemerintah Pusat namun putusan pengadilan terjadi setelah PBB-P2 dikelola oleh daerah. Kondisi demikian mengakibatkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 dicabut dan diganti

dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah. Dengan adanya peraturan bersama yang baru ini diharapkan semua permasalahan yang berkaitan dengan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah dapat segera diselesaikan.

c. Objek Pajak PBB-P2

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 77 ayat 1, objek PBB-P2 adalah bumi dan/ bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

d. Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 3, objek pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek pajak yang:

- 1) digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- 3) digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;

- 4) merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - 5) digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
- digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan.

e. NJOPTKP

- 1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 77 ayat 4, besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
- 2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 77 ayat 5, Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana yang dimaksud ayat 4 ditetapkan dengan peraturan daerah.

f. Subjek Pajak dan Wajib Pajak PBB-P2

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 78 ayat 1 dan 2:

- 1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ memperoleh manfaat atas bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan.

- 2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas bangunan.

g. NJOP

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 79:

- 1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- 2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- 3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Kepala Daerah.

h. Tarif PBB-P2

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 80 ayat 1 dan 2:

- 1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (no koma tiga persen).
- 2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

i. SPOP

berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 83

- 1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.

- 2) SPOP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Daerah yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.
- Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 84 :

Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPPT. Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal sebagai berikut:

- 1) SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Daerah sebagaimana telah ditentukan dalam surat teguran;
- 2) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

j. Prosedur PBB-P2

Ditjen Perimbangan Keuangan (2014: 55) Dalam pembayaran PBB-P2, wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pembayaran melalui Petugas Pemungut

Petugas Pemungut adalah pihak yang memverifikasi dan mencocokkan data pada SPPT atau SKPD dengan data pada DHKP serta memberikan Tanda Terima Sementara (TTS) kepada WP.

2) Pembayaran melalui Tempat Pembayaran yang Ditunjuk

Petugas di Tempat Pembayaran merupakan pihak yang memverifikasi dan memberikan stempel lunas pada Surat Tanda Terima Setoran (STTS), menyiapkan daftar realisasi, menyetor uang pembayaran PBB ke rekening kas daerah di bank, serta membuat buku penerimaan dan penyetoran.

3) Pembayaran melalui Tempat Pembayaran Elektronik

Tempat Pembayaran Elektronik (TPE) adalah tempat pembayaran yang disediakan oleh penyedia jaringan yang bekerja sama dengan pemda dan secara otomatis tersambung dengan sistem pada Tempat Pembayaran. TPE dapat berupa Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Short Messaging Services* (SMS), ataupun internet.

3. Tingkat Pendidikan

a. Pengertian Tingkat Pendidikan

Dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Crow dan Crow, mendefinisikan pendidikan adalah proses yang berisi berbagai macam kegiatan yang sesuai dengan kegiatan seseorang untuk kehidupannya sosialnya dan membantunya meneruskan kebiasaan dan kebudayaan, serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi.

Ahmad D. Marimba mendefinisikan pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama atau insan kamil.

Demikian beberapa pendapat tentang pendidikan, dari beberapa definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa pendidikan adalah:

- 1) Suatu pengarahan atau bimbingan yang diberikan kepada anak dalam pertumbuhannya.
- 2) Suatu usaha sadar untuk menciptakan suatu keadaan atau situasi tentang yang di kehendaki oleh masyarakat.
- 3) Suatu pembentukan kepribadian dan kemampuan anak menuju kedewasaan.
- 4) Suatu bimbingan yang berperan untuk membentuk insan kamil.

Tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan wajib pajak lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi pada kenyataannya saat ini wajib pajak yang memiliki tingkat pendidikan tinggi malah banyak melakukan penyelewengan dibidang

perpajakan bahkan melakukan pembukuan ganda untuk kepentingan pajak, tingkat yang minim juga akan berpeluang wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban perpajakan yang ditetapkan.

Apabila dikaitkan dengan pembayaran pajak maka wajib pajak yang memiliki latar belakang pendidikan lebih tinggi belum tentu lebih patuh daripada wajib pajak yang memiliki latar belakang pendidikan yang minim. Karena saat ini banyak wajib pajak yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi melakukan penyelewengan pajak bahkan membuat pembukuan ganda untuk kepentingan yang berbeda-beda, seperti membesarkan laba jika untuk mengajukan kredit di bank dan membuat pembukuan kecil untuk keperluan pajak. Wajib pajak yang berlatar belakang pendidikan minim sama saja karena kurangnya pemahaman mereka tentang sistem perpajakan yang diterapkan.

4. Tingkat Penghasilan

a. Pengertian Penghasilan

Dalam kamus Ekonomi, penghasilan adalah uang yang diterima seseorang dalam perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, laba dan lain sebagainya, bersama dengan tunjangan pengangguran, uang pensiun dan lain sebagainya.

Senada dengan definisi diatas, dalam webster's juga di sebutkan bahwa *earning is money gained by labor, services or perfomance*,

wages, salary, etc. Artinya penghasilan adalah uang diperoleh dari hasil bekerja, pelayanan diri, gaji, upah, dan lain-lain.

Menurut kadriyah, penghasilan seseorang terdiri dari penghasilan berupa upah/gaji, bunga sewa, dividen, keuntungan, dan merupakan suatu arus uang yang diukur dalam suatu jangka waktu, umpannya seminggu, sebulann atau setahun.

Jadi, yang dimaksud dengan penghasilan adalah uang yang diperoleh wajib pajak orang pribadi yang berasal dari pekerjaannya atau modal yang lainnya.

b. Sumber Penghasilan

Menurut sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Indonesia, pola penghasilan rumah tangga terdiri dari upah dan gaji, keuntungan usaha rumah tanngga yang berbadan hukum dan penerimaan transfer.

Sumber-sumber pendapatannya adalah:

- 1) Gaji dan upah yang diperoleh dari:
 - a) Kerja pokok
 - b) Kerja sampingan
 - c) Kerja lembur
 - d) Kerja kadang-kadang
- 2) Usaha sendiri, yang meliputi:
 - a) Hasil bersih dari usaha sendiri
 - b) Komisi
 - c) Penjualan dari kerajinan rumah

- 3) Hasil investasi, yakni penghasilan yang diperoleh dari hak milik tanah.
- 4) Keuntungan sosial, yakni penghasilan yang diperoleh dari kerja sosial.

c. Tingkat Penghasilan

Para perintis ilmu ekonomi, membagi masyarakat atas tiga kategori, yaitu kaum pekerja (dan petani), para pengusaha atau kapitalis (kelas menengah) dan para tuan tanah. Menurut Valerie J. Hull yang dikutip oleh Masri Singarimbun, bahwa jumlah seluruh pendapatan dan kekayaan keluarga termasuk barang dan hewan peliharaan dipakai untuk membagi keluarga kedalam tiga kelompok pendapatan yaitu pendapatan tinggi, pendapatan menengah, pendapatan rendah. Golongan berpenghasilan rendah adalah golongan yang memperoleh atau penerimaan sebagai imbalan terhadap kerja mereka yang jumlahnya jauh lebih sedikit apabila dibandingkan dengan kebutuhan pokok. Dilihat dari ekonomi dalam masyarakat terdiri dari tiga lapis yaitu:

- 1) Lapisan ekonomi mampu atau kaya, terdiri dari para pejabat, pemerintah setempat, para dokter, insinyur, dan kelompok finansial lainnya.
- 2) Lapisan ekonomi menengah, yang terdiri dari alim ulama dan pegawai.

- 3) Lapisan ekonomi miskin, yang terdiri dari buruh, para petani, buruh bangunan, buruh pabrik, dan buruh-buruh sejenis yang tidak tetap.

5. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dari self assessment system, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010: 138), menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan melaksanakan hak perpajakannya.

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010: 139), menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari:

- 1) Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.

- 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
- 3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
- 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Menurut keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK/.04/2000 dalam Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006: 112), menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki peran penting dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menerapkan Self Assessment System. Dengan tingkat kepatuhan yang tinggi berarti wajib pajak sudah dengan sukarela membayar pajaknya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara Indonesia. Kepatuhan wajib pajak menciptakan keharmonisan antara wajib pajak dan petugas pajak. Pajak yang bersifat memaksa akan terasa memberatkan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga menyulitkan petugas pajak untuk memperoleh penerimaan pajak yang tinggi. Namun, jika wajib pajak patuh

untuk membayar pajak, petugas pajak akan menerima pendapatan negara yang tinggi dari sektor pajak

b. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006: 110) adalah:

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) tahunan anggaran tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan Surat Pemberitahuan (SPT)

wajib pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh akuntan publik dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan pada a,b,c dan d diatas

C. Hipotesis

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kajian pustaka, dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

1. Secara parsial :

$H_{1.1}$: tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_{1.2}$: tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Secara simultan :

H_2 : terdapat pengaruh tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sugiyono (2012:17) jenis penelitian jika dilihat dari tingkat eksplanasi ada 3 (tiga) macam yaitu:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif yakni penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri satu variabel atau lebih (independent) tanpa membuat perbandingan atau hubungan dengan variabel lain.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif yakni penelitian yang bersifat membandingkan antara dua variabel atau lebih.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian Asosiatif yakni penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang dihubungkan.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian asosiatif yaitu penelitian yang berguna untuk mengukur hubungan-hubungan antara variabel riset, atau berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini asosiatif yaitu untuk mengetahui nilai pengaruh variabel tingkat pendidikan, tingkat penghasilan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) (Studi kasus Kecamatan Ilir Barat II

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kecamatan Ilir Barat II Palembang jl. Makrayu 32 Ilir Palembang.

C. Operasionalisasi Variabel

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala pengukuran
Tingkat pendidikan X1	Tingkat Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang didapat atau diperoleh seseorang mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat atau jenjang pendidikan terakhir yang sudah ditempuh oleh wajib pajak.	a. SD, SMP, SMA b. D1, D2, D3 c. S1, S2, S3	Skala Interval
Tingkat penghasilan X2	Tingkat penghasilan adalah jenjang atau tahap pendapatan (biasanya berupa uang) yang diperoleh seseorang dari hasil usaha yang dikerjakan. Tingkat penghasilan yang dimaksud adalah jumlah penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam kurung waktu satu tahun yang dikategorikan.	a. <Rp. 2.500.000 – Rp. 5.000.000 b. Rp. 6.000.000 – Rp. 10.000.000 c. >Rp. 10.000.000	Skala Interval
Kepatuhan wajib pajak Y	dapat meningkatkan penerimaan negara. Kepatuhan wajib	a. Pelaporan SPT tepat pada waktunya	Skala Interval

	pajak dapat menciptakan keharmonisan antara wajib pajak dan petugas pajak	b. Sanksi pajak c. Tidak punya tunggakan	
--	---	---	--

Sumber: Penulis, 2015

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (sugiyono, 2013: 117)

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak yang ada di kecamatan di Ilir Barat II Palembang.

Tabel III.2
Populasi Penelitian

No	Kelurahan	Wajib Pajak
1	27 Ilir	285
2	28 Ilir	267
3	29 Ilir	751
4	30 Ilir	2.230
5	32 Ilir	1.375
6	35 Ilir	693
7	Kemang Manis	1.234
Jumlah		6.833

Sampel menurut sugiyono (2013: 118) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Sampel yang digunakan menurut slovin adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N.e^2}$$

Dimana:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel
(10%)

$$n = \frac{6833}{1 + 6833(10\%)^2}$$

$$n = 99,98536728 = 99$$

jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 99 sampel

Tabel III.3
Sampel Penelitian

No	Kecamatan	Populasi	Sampel
1	27 Ilir	285	4 orang
2	28 Ilir	267	4 orang
3	29 Ilir	751	11 orang
4	30 Ilir	2.230	32 orang
5	32 Ilir	1.375	20 orang
6	35 Ilir	693	10 orang
7	Kemang Manis	1.234	18 orang
JUMLAH			99 0rang

E. Data yang Diperlukan

Menurut Nur dan bambang (2009: 146-147) data penelitian pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi :

1. Data Primer

Data Primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tidak melalui perantara)

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh orang lain).

Data yang akan penulis dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil perolehan data jawaban dari sampel wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) di Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang. Sedangkan data sekunder adalah skunder diperoleh dari artikel, jurnal dan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

F. Metode Pengumpulan Data

Sugiyono (2012: 402-405) dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut:

1. *Interview* (wawancara)

Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.

2. *Kuesioner* (angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Wawancara dengan komunikasi langsung dengan kepala bagian pengurus PBB. Kuesioner adalah pertanyaan tertulis yang dilakukan dengan menyebarkan kepada masyarakat kecamatan Ilir Barat II Palembang. Dokumentasi dengan mengumpulkan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu.

G. Analisis data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Sugiyono (2012: 13-14) analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

b. Analisis kuantitatif

Analisis kuantitatif yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan pengujian statistik dari hasil kuesioner, kemudian hasil pengujian tersebut akan dijelaskan menggunakan kalimat-kalimat. Dengan kata lain, analisis Kuantitatif terlebih dahulu digunakan kemudian dilanjutkan dengan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk melihat hasil kuesioner dengan menggunakan tabulasi (tebelaris) yang berupa penilaian hasil dari pengisian kuesioner.

Sugiyono (2012: 93), terdapat beberapa macam skala pengukuran:

a. Skala Likert

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.

b. Skala Guttman

Skala pengukuran dengan tipe ini, akan didapat jawaban yang tegas, yaitu “ya-tidak”; “benar-salah”; “pernah-tidak pernah”; positif-negatif; dan lain-lain. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikotomi (dua *alternative*).

1) *Semantic Differensial*

Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun *checklist*, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawaban “sangat positif” terletak di bagian kanan garis, dan jawaban yang “sangat negatif” terletak di bagian kiri garis, atau sebaliknya. Data yang diperoleh adalah data interval, dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap / karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang.

2) *Rating Scale*

Dari ketiga skala pengukuran seperti yang telah dikemukakan, data yang diperoleh semuanya adalah data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan. Tetapi dengan *rating-scale* data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif.

Dalam penelitian ini skala yang digunakan adalah skala likert. Pada skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator

tersebut akan dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban pada skala likert dapat berupa kata-kata antara lain:

Tidak Setuju = S = 1

Ragu-ragu = RR = 2

Setuju = TS = 3

Syarat untuk pengujian analisis dengan menggunakan regresi datanya harus interval, maka data yang diperoleh dari kuesioner berbentuk ordinal dinaikkan skalanya menjadi interval. Proses menaikkan skala dari ordinal menjadi interval digunakan *software* (program) MSI (*Microsoft Succesive Interval*).

2. Teknik Analisis

a. Uji Validitas

Sugiyono (2012: 352), validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan dalam suatu kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh

kuesioner tersebut. Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat benar-benar dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan alat bantu program statistik, dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Jika nilai r_{hitung} positif dan $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka butir pernyataan tersebut valid.
- 2) Jika nilai r_{hitung} negative dan $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka butir pernyataan tersebut tidak valid.
- 3) r_{hitung} dapat dilihat pada kolom *Corrected Item Total Correlation*.

b. Uji Reliabilitas

Sugiyono (2012:354), uji reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Dalam pandangan *positivistic* (kuantitatif), suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam obyek yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti sama dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda. Pengujian reliabilitas dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan yang sudah valid untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang pada kelompok yang sama dengan alat pengukuran yang sama. Teknik statistik ini digunakan untuk pengujian tersebut dengan koefisien *Cronbach's Alpha* dengan bantuan *software SPSS*.

Cronbach's Alpha merupakan uji reliabilitas untuk alternatif jawaban lebih dari dua. Secara umum suatu instrumen dikatakan reliabel jika memiliki koefisien *Cronbach's Alpha* > 0.6 . Dasar pengambilan keputusan uji Reliabilitas:

- 1) *Cronbach's Alpha* > 0.6 _ *Cronbach's Alpha acceptable (construct reliable)*
- 2) *Cronbach's Alpha* < 0.6 _ *Cronbach's Alpha poor acceptable (construct unreliable)*

c. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam pengujian ini terdapat dua cara yang biasa digunakan untuk menguji normalitas model regresi tersebut yaitu dengan analisis grafik (*normal P-P plot*) dan analisis statistik (*One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*). Dalam melakukan pengujian normalitas untuk penelitian ini menggunakan *Normal P-P plot*. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian normalitas yaitu:

- a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti

arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian dalam regresi yaitu nilai dari variable dependen tidak berpengaruh terhadap nilai variable itu sendiri. Pengujian ini menggunakan model uji *Durbin Watson* (DW). Model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung autokorelasi. pelanggaran terhadap asumsi ini berakibat interval keyakinan terhadap hasil estimasi menjadi melebar sehingga uji signifikan tidak kuat. Durbin Watson (DW) berkisar antara -2 sampai +2 menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

3) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent variable*). Untuk mendeteksi apakah terjadi multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor VIF*).

Melihat nilai Tolerance :

- a) Tidak terjadi Multikolinearitas, jika nilai Tolerance lebih besar 0,10.

- b) Terjadi Multikolinearitas, jika nilai Tolerance lebih kecil atau sama dengan 0,10.

Melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) :

- a) Tidak terjadi Multikolonieritas, jika nilai VIF lebih kecil 10,00.
- b) Terjadi Multikolonieritas, jika nilai VIF lebih besar atau sama dengan 10,00.

4) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut homoskedastisitas, sedangkan untuk varians yang berbeda disebut heterokedastisitas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu melihat *scatter plot* (nilai prediksi dependen ZPRED dengan residual SRESID), uji *Glesjer*, uji *Park*, uji koefisien korelasi Spearman. Dalam melakukan pengujian heteroskedastisitas untuk penelitian ini menggunakan uji *scatter plot*. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian heteroskedastisitas dengan melihat *scatter plot* yaitu :

- a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas

b) Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentase total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Apabila analisis yang digunakan adalah regresi sederhana, maka yang digunakan adalah nilai *R Square*. Namun, apabila analisis yang digunakan adalah regresi berganda, maka yang digunakan adalah *Adjusted R Square*.

Hasil perhitungan *Adjusted R²* dapat dilihat pada output *model summary*.

Pada kolom *Adjusted R²* dapat diketahui berapa persentase yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Sedangkan sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.

e. Regresi Linear Berganda

Sugiyono (2009: 277), analisis regresi berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, X_3) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel independen

mengalami kenaikan atau penurunan. Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2 (dua).

Persaman regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan

X₁ : tingkat pendidikan

X₂ : tingkat penghasilan

a : Nilai konstanta, perpotongan garis pada sumbu X

b : Koefisien regresi variabel X

e : Erros/Residual

f. Uji Hipotesis

1) Uji hipotesis secara parsial/individual (Uji t)

Pengujian hipotesis secara parsial/individual merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan hanya satu B (B1 atau B2) yang mempengaruhi Y. Langkah-langkah dalam uji hipotesis secara parsial atau individual yaitu:

a) . Merumuskan Hipotesis

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H_{02.1}: tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_{a2.1}: tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_{02.2}$:tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_{a2.2}$:tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat signifikan sebesar 5%, Taraf nyata dan t_{tabel} ditentukan dari derajat bebas $(db) = n-k-1$.

b) Menentukan Taraf Nyata

Tingkat signifikan sebesar 5%, taraf nyata dan t_{tabel} ditentukan dari derajat bebas $(db) = n-k-1$.

- i. H_0 ditolak dan H_a diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$. Berdasarkan probabilitas: H_0 ditolak jika $P \text{ value} < 5\%$ H_0 diterima jika $P \text{ value} > 5\%$.

- ii. Kesimpulan

Menarik kesimpulan H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau H_a diterima apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$.

2) Pengujian hipotesis secara bersama (Uji F)

Pengujian hipotesis secara bersama merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan X_1 dan X_2 , secara bersama-sama mempengaruhi Y .

a) Merumuskan Hipotesis

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

H_{01} : tingkat pendidikan, tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan.

H_{a1} : tingkat pendidikan, tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan.

- b) Menentukan Taraf Nyata
- c) Tingkat signifikan sebesar 5%, taraf nyata dari F_{tabel} ditentukan dari $df1 = k - 1$ dan $df2 = n - k$, dimana k adalah jumlah variabel (bebas + terikat) dan n adalah jumlah observasi/sampel pembentuk regresi.
- d) Kesimpulan H_0 ditolak dan H_a diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Kecamatan Ilir Barat II

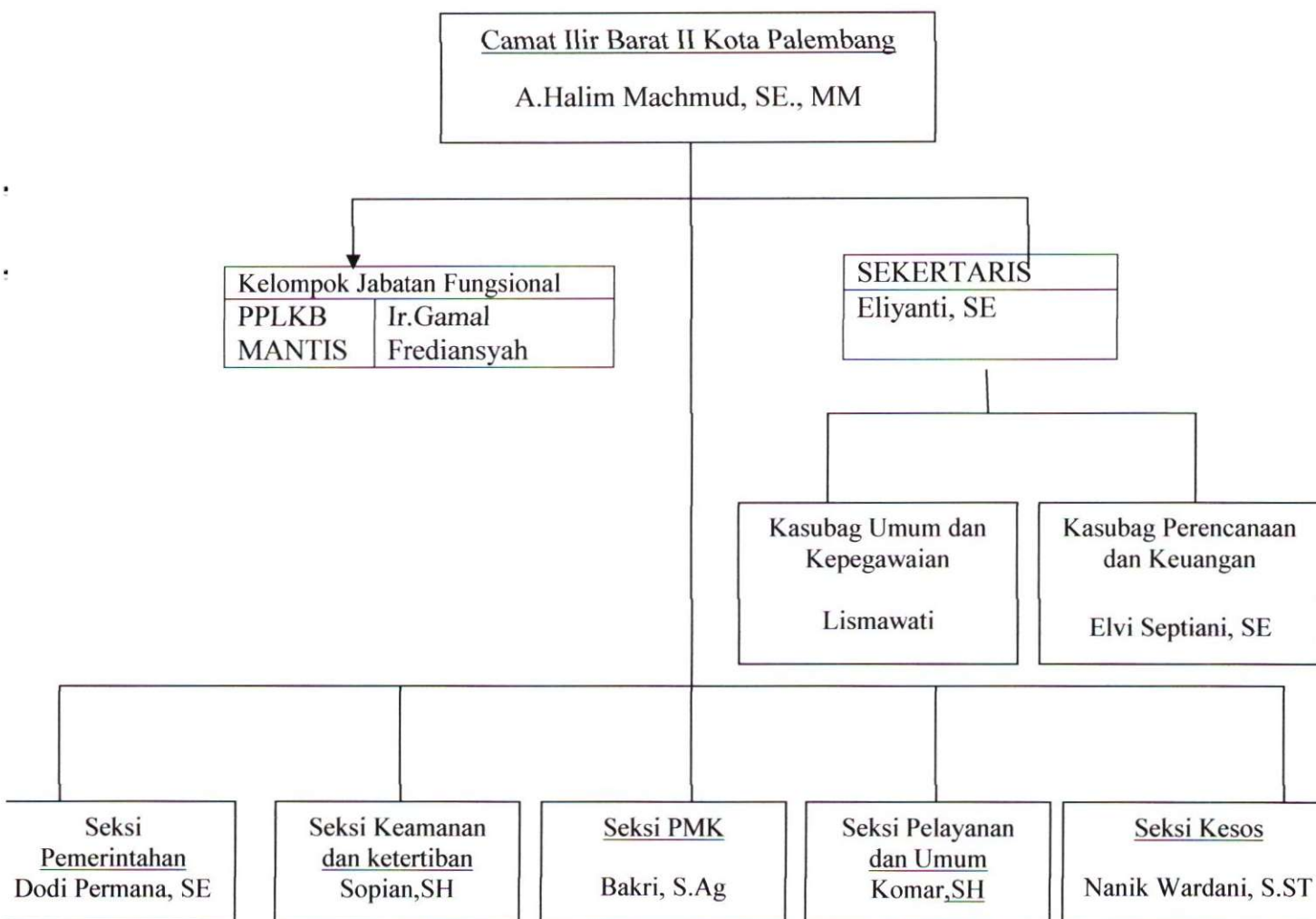
Daerah kecamatan ilir barat II sebagian terletak di pinggir sungai musi yang terdiri 7 Kelurahan dengan luas wilayah 1622.00 Ha, Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Bukit Kecil di sebelah utara, Kecamatan ilir Barat I dan Kecamatan Gandus sebelah timur, Kecamatan Gandus di sebelah selatan dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Ilir Barat I. Adapun 7 (tujuh) kelurahan di kecamatan Ilir Barat II yaitu:

- a. 35 Ilir
- b. 32 Ilir
- c. 30 Ilir
- d. Kemang Manis
- e. 29 Ilir
- f. 28 Ilir
- g. 27 Ilir

Tabel IV. 1
Persebaran Penduduk Kecamatan Ilir Barat II

Kelurahan	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Per Ha
35 Ilir	33.00	11.195	361,1
32 Ilir	250.00	14.041	56,2
30 Ilir	71.00	20.592	290,0
Kemang Manis	100.00	6.487	64,9
29 Ilir	33.00	9.076	275,0
28 Ilir	68.00	2.396	35,2
27 Ilir	67.00	3.947	52,2
Jumlah	622,00	68.004	109,3

2. Struktur Organisasi Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang



3. Tugas Pokok Masing-masing Jabatan

a. Camat

1) Kedudukan

Camat adalah kepala pemerintahan kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

2) Tugas

Melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintahan kecamatan

3) Fungsi

- a) Menyusun rencana, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaannya;
- b) Urusan administrasi keuangan;
- c) Urusan tatausaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

4) Sekretaris Kecamatan terdiri dari:

a) Urusa Perencanaan

- (1) Urusan perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.
- (2) Urusan perencanaan mempunyai tugas, melakukan penyusunan rencana pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya serta menyusun laporan.

b) Urusan Umum

- (1) Urusan umum dipimpin oleh seorang Kepala urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

- (2) Urusan umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga.

c. Seksi Pemerintahan

- 1) Kedudukan

Seksi pemerintahan adalah unsur pelaksanaan kecamatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan.

- 2) Tugas

Seksi pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pemerintahan umum, pemerintahan kelurahan, urusan pelayanan umum, pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan ideology dan politik dalam negeri serta polisi pamong praja.

- 3) Fungsi

- a) Menyelenggarakan pemerintahan umum;
- b) Membina pemerintahan kelurahan;
- c) Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan pelayanan kependudukan dan catatan sipi;
- d) Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan pelayanan perizinan;
- e) Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan pelayanan ketertiban wilayah;

- f) Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan pelayanan ketentraman, ideology Negara dan politik dalam negeri;
 - g) Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan pelayanan Polisi Pamong Praja.
- d. Seksi Keamanan dan Ketertiban
 - 1) Kedudukan

Seksi keamanan dan ketertiban adalah unsur pelaksana teknis opsional kewilayahan yang dipimpin seorang kepala seksi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - 2) Tugas
 - a) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian dan TNI dibidang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban diwilayah kecamatan;
 - b) Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada diwilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan masyarakat diwilayah Kecamatan;
 - c) Melaporkan pelaksanaan pembinaan keamanan dan ketertiban;
 - d) Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan diwilayah Kecamatan.

e. Seksi PMK

1) Kedudukan

Seksi pembanguna masyarakat Kelurahan adalah unsur pelaksanaan Kecamatan dibidang pembangunan yang dipimpin oleh kepala seksi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2) Tugas

Seksi pembangunan masyarakat kelurahan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan penyusunan program, pengendalian dan pembinaan serta mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

3) Fungsi

- a) Menyusun program dan menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi;
- b) Menyusun program dan menyelenggarakan pembinaan pembangunan pada umumnya serta pembinaan lingkungan hidup;
- c) Menyusun program pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olahraga;
- d) Menyusun program pembinaan kehidupan beragama, pendidikan dan kesehatan.

f. Seksi Pelayanan Umum

1) Kedudukan

Seksi pelayanan umum adalah unsur pelaksanaan pemerintah kecamatan dibidang penyelenggaraan pelayanan umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.

2) Tugas

Mengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

3) Fungsi

- a) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah atau instansi vertikal yang tugas dan fungsi dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b) Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum;
- c) Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum diwilayah Kecamatan;
- d) Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- e) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.

g. Seksi Kesos

1) Kedudukan

Kesejahteraan sosial adalah unsur pelaksanaan pemerintah kecamatan dibidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Camat.

2) Tugas

Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan dibidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan agama di tingkat kecamatan.

3) Fungsi

- a) Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang agama, termasuk urusan haji, serta pendidikan dan kesehatan di kecamatan;
- b) Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan;
- c) Melakukan pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana di Kecamatan.

4. Gambaran Umum Responden

Deskripsi responden dapat dilihat dari demografi responden yang meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan. Berikut tabel IV.1 yang menjelaskan mengenai gambaran umum responden di Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang.

Table IV.2
Karakteristik Responden

Data Responden	Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Pria	58	58%
	Wanita	41	41%
Usia	< 30 Tahun	17	17%
	31 Tahun-40 Tahun	36	36%
	41 Tahun-50 Tahun	32	32%
	> 51 Tahun	14	14%
Tingkat Pendidikan	SD-SMA	29	29%
	D1-D3	27	27%
	S1-S3	43	43%
Penghasilan perbulan	< Rp 2.500.000	60	60%
	Rp 6.000.000-Rp 10.000.000	29	29%
	>Rp 10.000.000	10	10%

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2015

Berdasarkan tabel IV.2 di atas dapat dilihat bahwa responden Pria lebih dominan yaitu sebanyak 58% dibandingkan dengan responden wanita sebanyak 41%. Dari segi usia responden diperoleh hasil bahwa responden dengan usia < 30 tahun 17%, antara 31-40 tahun 36%, antara 41-50 tahun 32%, di atas 50 tahun 14%. Berdasarkan dari tingkat pendidikan responden dengan tingkat pendidikan dari SD-SMA 29%, D1-D3 27%, S1-S3 43%, Berdasarkan dari penghasilan, responden dengan

penghasilan <Rp.2.500.000 sebanyak 60%, Rp. 6.000.000-Rp.10.000.000 sebanyak 29%, >Rp.10.000.000 sebanyak 10%.

5. Deskriptif Data Hasil Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada transformasi terhadap data penelitian dalam tabulasi, sehingga mudah diinterpretasikan dan mudah dipahami. Kuesioner ini telah dibagikan kepada 99 wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang. Hasil kuesioner ini layak dijadikan sumber data untuk melakukan analisis. Hasil dari penyebaran kuesioner secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel IV.3.

Tabel IV.3
Jumlah Sampel Di Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang

No	Jumlah Kelurahan	Jumlah kuesioner	Data tidak kembali	Diolah
1	27 ilir	4	-	4
2	28 ilir	4	-	4
3	29 ilir	11	-	11
4	30 ilir	32	-	32
5	31 ilir	20	-	20
6	32 ilir	10	-	10
7	35 ilir	18	-	18
Total				99

Sumber: Penulis, 2015

Kuesioner yang dibagikan kepada responden yang terdiri dari 3 (tiga) variabel 2 (dua) variabel X (bebas) yaitu, tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan dan variabel Y (terikat) yaitru variabel kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perkotaan dann perdesaan (PBB-P2). Kuesioner dilakukan setelah penulis melakukan tryout terhadap 100 responden.

Data yang sudah diberikan skor kemudian disusun ke dalam tabulasi yang

memudahkan peneliti dalam berbagai analisis pada penelitian ini, dengan cara memberikan informasi yang dibutuhkan. Skor atas jawaban dari responden kemudian dijumlahkan berdasarkan variabel untuk masing-masing responden. Rekapitulasi data mengenai jawaban responden tentang tingkat pendidikan (X1), tingkat penghasilan (X2), dan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Y).

Berdasarkan hasil output dari hasil kuisioner yang dibagikan kepada wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang menggunakan skala likert maka diperoleh data sebagai berikut:

6. Analisis Deskriptif tingkat Pendidikan

Tabel IV.4
Data Deskriptif Variabel Tingkat Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD, SMP, SMA	29	29,3	29,3	29,3
	D1, D2, D3	27	27,3	27,3	66,,6
	S1, S2, S3	43	43,4	43,4	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Sumber : Hasil penelitian data yang diolah, 2015

Berdasarkan tabel IV.4 Dapat dilihat diatas bahwa responden untuk tingkat pendidikan dari SD,-SMA 29 orang, untuk tingkat D1-D3 27 orang, dari tingkat S1-S3 43 orang. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak sudah memiliki sikap dan pandangan yang positif terhadap adanya aturan perpajakan di indonesia khususnya di bidanng PBB-P2, Hal ini juga mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki maka akan semakin baik dan positif

akan arti pentingnya perpajakan di indonesia dan akan berpengaruh positif pula terhadap kepatuhan wajib pajak khususnya PBB-P2.

7. Analisis Deskriptif tingkat Penghasilan

Tabel IV.5
Data Analisis Deskriptif Tingkat Penghasilan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < Rp. 2.500.000 - Rp. 5.000.000	60	60,6	60,6	60,6
Rp. 6.000.000 - Rp. 10.000.000	29	29,3	29,3	89,9
> Rp. 10.000.000	10	10,1	10,1	100,0
Total	99	100,0	100,0	

Sumber : Hasil penelitian data yang diolah, 2015

Berdasarkan tabel IV.5 dapat dilihat diatas bahwa responden penghasilan < Rp. 2.500.000- Rp. 5.000.000 sebanyak 60 wajib pajak, untuk penghasilan dari Rp 6.000.000- Rp. 10.000.000 sebanyak 29 wajib pajak, untuk penghasilan > 10.000.000 sebanyak 10 wajib pajak. Keadaan ekonomi yang dimiliki oleh wajib pajak dapat menjadi suatu dorongan motivasi untuk dapat memenuhi kewajiban PBB yang dimiliki. Disisi lain, apabila seseorang mempunyai kondisi ekonomi yang tinggi, maka tingkatan kebutuhan dari orang tersebut akan semakin banyak dan beragam. Hirarki kebutuhan manusia yang diungkapkan Maslow menjelaskan bahwa manusia mempunyai tingkatan kebutuhan yang dapat membedakan setiap manusia dari sisi kesejahteraan hidupnya. Semakin tinggi kesejahteraan manusia, maka tingkatan yang ingin dipenuhi akan semakin tinggi dan dengan demikian, pemenuhan-pemenuhan kewajiban akan semakin beragam pula.

8. Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel IV.6
Data Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	Penilaian			Total
		TS	R	S	
1	Saya selalu tepat waktu dalam menyampaikan SPT	1	9	89	99
2	Sebagai wajib pajak, saya tidak pernah melakukan tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk menunda pembayaran pajak dari kantor pajak	1	8	90	99
3	Saya tidak pernah dijatuhkan sanksi pidana dan tidak pernah melakukan tindak kejahatan dibidang perpajakan	0	7	92	99

Sumber : Hasil penelitian data yang diolah, 2015

Berdasarkan tabel IV.6 pertanyaan kesatu wajib pajak yaitu: saya selalu tepat waktu dalam menyampaikan SPT, sebanyak 89 responden atau 89,9% menjawab setuju dengan alasan karena hal tersebut merupakan dari ketentuan pajak.

Pertanyaan kedua yaitu: sebagai wajib pajak, saya tidak pernah melakukan tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk menunda pembayaran pajak dari kantor pajak, sebanyak 90 responden yang menjawab setuju dengan alasan karena takut dengan hukum yang berlaku.

Pertanyaan yang ketiga yaitu: saya tidak pernah dijatuhkan sanksi pidana dan tidak pernah melakukan tindak kejahatan dibidang perpajakan, sebanyak 92 responden menjawab setuju dengan alasan karena takut terhadap hukum yang berlaku saat ini.

9. Gambaran karakteristik variabel

Kuesioner yang diberikan kepada responden terdiri dari 3 variabel, 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebas adalah tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan dan variabel terikat adalah Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Data ordinal yang sudah diberikan skor kemudian disusun kedalam tabulasi yang membantu peneliti dalam melakukan berbagai analisis pada penelitian ini. Kemudian skor atas jawaban dari responden dijumlahkan berdasarkan variabel untuk masing-masing responden. Data ordinal yang di dapat dari jawaban kuesioer responden kemudian dinaikkan menjadi data interval guna memenuhi syarat dalam menggunakan analisis regresi dengan menggunakan program (*software*) MSI (*Microsoft Successive Interval*). Rekapitulasi data mengenai jawaban responden tentang tingkat pendidikan (X1) dan tingkat penghasilan (X2) dan kepatuhan wajib pajak (Y) dapat dilihat di tabel IV.7.

Tabel IV.7
Rekapitulasi Hasil Data Jawaban Responden

Res	Data Ordinal			Data Interval		
	X1	X2	Y	X1	X2	Y
1	3	2	9	3,0801	2,3448	3,587
2	3	1	9	3,0801	1,0000	3,587
3	1	2	8	1,0000	2,3448	2,971
4	3	1	9	3,0801	1,0000	3,587
5	3	2	9	3,0801	2,3448	3,587
6	1	1	8	1,0000	1,0000	2,971
7	2	1	9	1,9921	1,0000	3,587
8	1	1	8	1,0000	1,0000	2,971
9	3	1	9	3,0801	1,0000	3,587
10	3	2	9	3,0801	2,3448	3,587
11	3	2	9	3,0801	2,3448	3,587
12	3	2	9	3,0801	2,3448	3,587

13	1	1	6	1,0000	1,0000	1,661
14	2	2	9	1,9921	2,3448	3,587
15	3	2	9	3,0801	2,3448	3,587
16	3	1	8	3,0801	1,0000	2,971
17	1	1	9	1,0000	1,0000	3,587
18	3	3	9	3,0801	3,3851	3,587
19	1	1	9	1,0000	1,0000	3,587
20	3	2	9	3,0801	2,3448	3,587
21	1	1	9	1,0000	1,0000	3,587
22	2	1	8	1,9921	1,0000	2,971
23	3	2	9	3,0801	2,3448	3,587
24	1	1	9	1,0000	1,0000	3,587
25	1	1	8	1,0000	1,0000	2,971
26	3	1	9	3,0801	1,0000	3,587
27	1	1	9	1,0000	1,0000	3,587
28	2	2	9	1,9921	2,3448	3,587
29	2	1	9	1,9921	1,0000	3,587
30	3	1	9	3,0801	1,0000	3,587
31	2	1	9	1,9921	1,0000	3,587
32	1	1	9	1,0000	1,0000	3,587
33	3	2	9	3,0801	2,3448	3,587
34	2	1	8	1,9921	1,0000	2,971
35	3	1	9	3,0801	1,0000	3,587
36	2	1	9	1,9921	1,0000	3,587
37	2	3	9	1,9921	3,3851	3,587
38	2	2	9	1,9921	2,3448	3,587
39	3	1	9	3,0801	1,0000	3,587
40	3	2	9	3,0801	2,3448	3,587
41	3	1	9	3,0801	1,0000	3,587
42	1	1	9	1,0000	1,0000	3,587
43	1	1	9	1,0000	1,0000	3,587
44	3	1	7	3,0801	1,0000	2,347
45	2	2	9	1,9921	2,3448	3,587
46	3	2	9	3,0801	2,3448	3,587
47	1	1	8	1,0000	1,0000	2,971
48	3	1	9	3,0801	1,0000	3,587
49	1	1	8	1,0000	1,0000	2,900
50	2	2	9	1,9921	2,3488	3,587
51	2	3	9	1,9921	3,3851	3,587
52	3	1	9	3,0801	1,0000	3,587
53	3	1	9	3,0801	1,0000	3,587
54	2	2	9	1,9921	2,3448	3,587

55	3	1	9	3,0801	1,0000	3,587
56	2	3	9	1,9921	3,3851	3,587
57	1	3	9	1,0000	3,3851	3,587
58	2	2	9	1,9921	2,3448	3,587
59	1	1	8	1,0000	1,0000	2,971
60	3	1	9	3,0801	1,0000	3,587
61	3	3	9	3,0801	3,3851	3,587
62	2	2	9	1,9921	2,3448	3,587
63	1	1	9	1,0000	1,0000	3,587
64	3	1	9	3,0801	1,0000	3,587
65	1	1	9	1,0000	1,0000	3,587
66	3	1	9	1,0000	1,0000	3,587
67	2	2	9	1,9921	2,3448	3,587
68	1	1	8	1,0000	1,0000	2,963
69	1	1	9	1,0000	1,0000	3,587
70	3	2	9	3,0801	2,3448	3,587
71	2	1	9	1,0000	1,0000	3,587
72	2	2	9	1,9921	2,3448	3,587
73	3	1	9	3,0801	1,0000	3,587
74	1	1	9	1,0000	1,0000	3,587
75	1	1	9	1,0000	1,0000	3,587
76	3	2	9	3,0801	2,3448	3,587
77	3	1	8	3,0801	1,0000	2,971
78	3	3	9	3,0801	3,3851	3,587
79	3	1	9	3,0801	1,0000	3,587
80	1	1	9	1,0000	1,0000	3,587
81	3	1	9	3,0801	1,0000	3,587
82	1	1	9	1,0000	1,0000	3,587
83	2	2	9	1,9921	2,3448	3,587
84	3	1	7	3,0801	1,0000	2,347
85	2	1	9	1,9921	1,0000	3,587
86	2	1	9	1,9921	1,0000	3,587
87	3	3	9	3,0801	3,3851	3,587
88	2	2	9	1,9921	2,3448	3,587
89	3	1	9	3,0801	1,0000	3,587
90	1	1	4	1,0000	1,0000	1,000
91	2	2	9	1,9921	2,3448	3,587
92	2	2	9	1,9921	2,3448	3,587
93	3	1	9	3,0801	1,0000	3,587
94	1	1	8	1,0000	1,0000	2,971
95	3	3	9	3,0801	3,3851	3,587
96	1	1	8	1,0000	1,0000	2,3448

97	3	1	9	3,0801	1,0000	3,587
98	2	2	8	1,9921	2,3448	2,900
99	1	3	9	1,0000	3,3851	3,587

Sumber: Hasil data primer yang diolah, 2015

10. Pengujian Validasi Dan Reabilitas Data

Data yang valid dan reliabel harus menjadi syarat dalam melakukan uji hipotesis penelitian agar hasil penelitian valid dan dapat dibuktikan. Berdasarkan hal tersebut, pengujian validitas dan reliabilitas data sangat mempengaruhi hasil penelitian. Oleh karena itu, sebelum melakukan analisis maka terlebih dahulu harus dipastikan bahwa data yang diterima penulis adalah valid dan reliabel. Uji validitas bertujuan untuk menguji sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif tidak berubah apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih. Dengan kata lain, validitas adalah indeks yang menunjukkan konsistensi suatu alat pengukuran di dalam mengukur gejala yang sama.

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan terhadap item-item pernyataan dari masing-masing variabel yang ada dalam kuesioner. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana item-item yang membentuk konsep yang telah disusun dapat mewakili variabel penelitian. Sebuah konsep dikatakan dapat mewakili variabel apabila r_{hitung} dari pernyataan lebih besar dari nilai r_{tabel} .

Nilai r_{tabel} untuk populasi pada penelitian ini sebanyak 99 responden dengan tingkat kepercayaan 95% atau tingkat signifikansi sebesar 5% dan $n = 99$ adalah 0,1966. Jadi, apabila r_{hitung} lebih kecil dari 0,1966 maka pernyataan tersebut dianggap tidak valid. Pengujian validitas ini dilakukan dengan menggunakan *SPSS for windows versi 16* dan diperoleh hasil sebagai berikut:

1) Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 (Y)

Hasil dari pengujian validitas dari butir pernyataan adalah sebagai berikut :

Tabel IV.8
Hasil Pengujian Validitas Variabel Kepatuhan wajib pajak PBB-P2 (Y)

Butir Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Status
1	0,819	0,196	Valid
2	0,817	0,196	Valid
3	0,611	0,196	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2015

Pada tabel IV.8 di atas hasil analisis didapat nilai *Pearson Correlation* (r_{hitung}) antara skor item dengan skor total. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai r_{tabel} , r_{tabel} dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 99, maka didapat r_{tabel} sebesar 0,196.

Berdasarkan hasil analisis didapat nilai *Pearson Correlation* (r_{hitung}) untuk semua item lebih besar dari 0,196 maka dapat disimpulkan bahwa

item-item tersebut berkorelasi signifikan dengan skor total (dinyatakan valid) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua butir instrument tersebut valid.

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan yang sudah valid untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang pada kelompok yang sama dengan alat pengukuran yang sama. Teknik statistik ini digunakan untuk pengujian tersebut dengan koefisien *Cronbach's Alpha* dengan bantuan *software SPSS 16*. *Cronbach's Alpha* merupakan uji reliabilitas untuk alternatif jawaban lebih dari dua. Secara umum suatu instrumen dikatakan reliabel jika memiliki koefisien *Cronbach's Alpha* > 0.6 .

Hasil pengujian reliabilitas untuk variabel tingkat pendapatan (X_1), sanksi pajak (X_2), dan kepatuhan wajib pajak (Y) dapat dilihat pada tabel IV.5 :

Tabel IV.9
Hasil Uji Reliabilitas

<i>Cronbach's Alpha</i>	N of item
,623	3

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2015

Teknik pengujian reliabilitas menggunakan koefisien *alpha cronbach* dengan taraf nyata 5%. Menurut Sekaran dalam Prayitno (2010: 98), jika

nilai cronbach's alpha item $\geq 0,6$ maka reliabel, sedangkan jika nilai cronbach's alpha item $< 0,6$ maka tidak reliabel.

Dari output di atas didapatkan nilai **Alpha Cronbach** = 0,623. Karena nilai *alpha cronbach* lebih besar daripada 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen dinyatakan reliabel.

11. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis data maka data diuji sesuai asumsi klasik yang bertujuan untuk mendapatkan regresi yang baik yang terbebas dari autokorelasi, multikolonieritas, heteroskedastisitas. Cara yang digunakan untuk menguji penyimpangan asumsi klasik adalah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

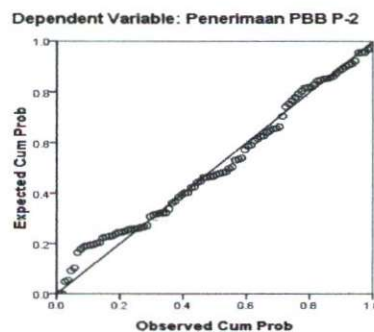
Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Pengujian normalitas untuk penelitian ini menggunakan analisis grafik *normal P-P plot*. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian normalitas, yaitu:

- 1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

- 2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Gambar IV.1
Hasil *output* SPSS
Uji Normalitas (*normal P-P plot*)

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2015

Berdasarkan gambar IV.1 di atas dapat disimpulkan bahwa grafik *normal P-P plot* terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah diagonal, maka grafik menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian dalam regresi yaitu nilai dari variabel dependen tidak berpengaruh terhadap nilai variable itu sendiri. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi kita menggunakan uji Durbin

Watson (DW). Uji Durbin Watson penelitian ini dibantu dengan SPSS 16 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel IV.10
Hasil Pengujian Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.361 ^a	.130	.122	.393139	1.980

a. Predictors: (Constant), penghasilan dan pendidikan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2015

Berdasarkan tabel IV.10 di atas nilai Durbin Watson (DW) pada penelitian yaitu sebesar 1,980 berada antara -2 dan +2 yang berarti tidak korelasi positif maupun negatif.

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent variable*). Untuk mendeteksi apakah terjadi multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor VIF*). Tidak terjadi Multikolinearitas, jika nilai Tolerance lebih besar 0,10 dan jika nilai VIF lebih kecil 10,00. Uji multikolinieritas penelitian ini dibantu dengan SPSS 16 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel IV.11
Hasil Pengujian Multikolinieritas

Coefficients^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Tingkat Pendidikan	,995	1,005
Tingkat Penghasilan	,995	1,005

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2015

Berdasarkan tabel IV.11 di atas nilai tolerance tiap variabel lebih besar 0,10 dan nilai VIF lebih kecil 10,00, maka dapat disimpulkan tidak terjadi persoalan multikolinieritas antar variabel bebas dalam penelitian ini.

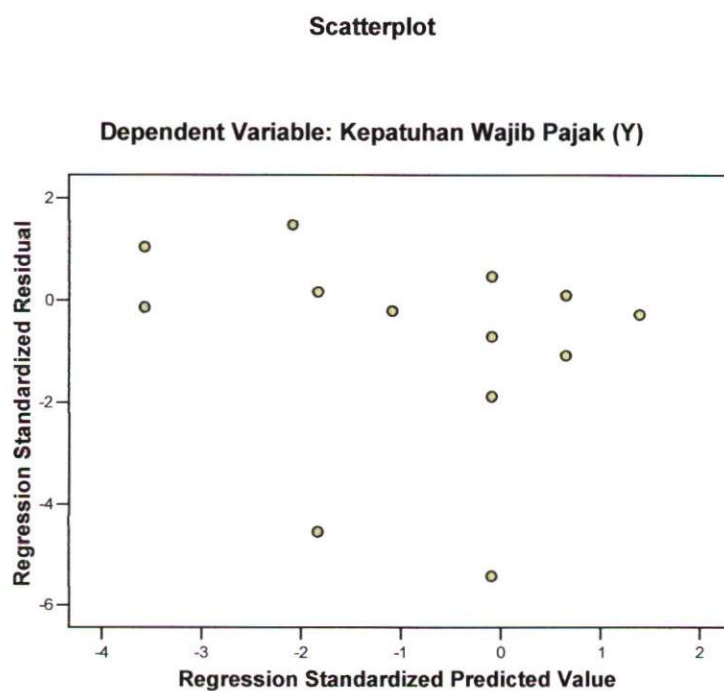
d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut homoskedastisitas, sedangkan untuk varians yang berbeda disebut heterokedastisitas. Dalam melakukan pengujian heteroskedastisitas untuk penelitian ini menggunakan uji *scatter plot*. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian heteroskedastisitas dengan melihat *scatter plot* yaitu :

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas

- 2) Jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar IV.2
Hasil *Output* SPSS
Uji Heteroskedastisitas (*Scatterplot*)



Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2015

Berdasarkan gambar IV.2 di atas, antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya diperoleh hasil tidak adanya pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

12. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan atau pengaruh antar variabel-variabel yang lebih dari satu dengan variabel terikat. Sebelum dilakukan uji hipotesis mengenai signifikansi antara hubungan variabel bebas dan variabel terikat maka terlebih dahulu harus diketahui apakah sebuah model memiliki hubungan yang linier. Setelah melakukan uji regresi dengan SPSS 16 maka hasil yang didapat dapat dilihat pada tabel IV.11 :

Tabel IV.12
Hasil Uji Regresi Linier berganda

Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,982	,121		24,670	,000
	Pendidikan (X1)	,117	,046	,247	2,546	,012
	Penghasilan (X2)	,108	,048	,218	2,243	,027

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2015

Dari tabel 1V.12 diatas dari hasil regresi berganda yang peneliti lakukan pada variabel tingkat pendidikan (X₁), tingkat penghasilan (X₂) terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 (Y) dapat digambarkan persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$

$Y = 0,508 + 1,103X_1 + 0,259X_2$

Dari persamaan regresi tersebut menggambarkan bahwa :

a. Pengaruh Konstanta (a)

Konstanta sebesar 2,982 menyatakan bahwa jika pendidikan dan penghasilan nilainya 0, maka nilai kepatuhan wajib pajak adalah 2,982.

b. Pengaruh Tingkat Pendidikan (X_1) Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 (Y)

Koefisien regresi X_1 sebesar 0,117 bernilai positif menyatakan bahwa setiap peningkatan satu satuan skor pendidikan akan meningkatkan skor kepatuhan wajib pajak sebesar 11,7% maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 (Y) sebesar 11,7%.

c. Pengaruh Tingkat Penghasilan (X_2) Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 (Y)

Koefisien regresi X_2 sebesar 0,108 bernilai positif, berarti bahwa tingkat penghasilan (X_2) memiliki hubungan erat dengan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 (Y) yaitu sebesar 10,8%, artinya jika ada kenaikan tingkat penghasilan sebesar 100% maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2 (Y) sebesar 10%.

13. Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentase total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Apabila analisis yang digunakan adalah regresi sederhana, maka yang digunakan adalah nilai *R Square*. Namun, apabila analisis yang digunakan

adalah regresi berganda, maka yang digunakan adalah *Adjusted R Square*.

Adjusted R Square dapat dilihat pada tabel IV.12 berikut :

Tabel IV.13
Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.361 ^a	.130	.112	.393139

a. Predictors: (Constant), tingkat pendapatan dan tingkat penghasilan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2015

Berdasarkan tabel IV.13 nilai korelasi (R) diperoleh sebesar = 0,130 atau 13% yang berarti bahwa hubunga variabel bebas yaitu pendidikan dan penghasilan dengan variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak adalah 13% sedangkan 87% lainnya ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

14. Pengujian Hipotesis

a. Pengujian hipotesis secara bersama (Uji F)

Untuk menjawab permasalahan bagaimanakah pengaruh Tingkat Pendidikan (X_1), tingkat penghasilan (X_2) secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 (Y), diuji dengan menggunakan uji F, hasilnya dapat dilihat dari tabel IV.13 :

Tabel IV.14
Hasil Output SPSS
Uji Secara Simultan (Uji F)

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2,219	2	1,110	7,180	.001 ^a
Residual	14,838	96	.155		
Total	17,057	98			

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2015

Berdasarkan tabel IV.14 hasil uji hipotesis untuk tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan, nilai F_{hitung} 7,180 > nilai F_{tabel} 2,70 maka hipotesis H_0 ditolak jadi secara simultan tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Tingkat signifikan sebesar 5%. Taraf nyata dari nilai F_{tabel} ditentukan dari derajat bebas (db) = $n-k-1$, jadi taraf nyata dari F_{tabel} adalah (db) = $99-2-1 = 96$ sehingga F_{tabel} diperoleh sebesar 2,70.

Berdasarkan kriteria pengujian nilai F_{sig} karena nilai F_{sig} 0,001 < nilai 0,05, jadi tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

a. Uji hipotesis secara parsial/individual (Uji t)

Untuk menjawab permasalahan bagaimanakah pengaruh tingkat pendapatan (X_1) dan sanksi pajak (X_2) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 (Y), maka hasilnya diuji dengan menggunakan uji t, dapat dilihat dari tabel IV.14 :

Tabel IV.15
Hasil Output SPSS
Uji Secara Parsial (uji t)

Coefficients ^a						
	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,982	.121		24,670	.000
	Tingkat pendidikan	.117	.046	.247	2.546	.012
	Tingkat penghasilan	.108	.048	.218	2,243	.027

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2015

Dapat dilihat pada tabel IV.15. Diatas hasil uji hipotesis secara parsial diketahui t_{hitung} untuk tingkat pendidikan (X_1) sebesar 2,546. Untuk tingkat penghasilan (X_2) sebesar 2,243. Berdasarkan kriteria pengujian nilai t_{sign} tingkat pendidikan (X_1) sebesar 0,012, dan untuk nilai t_{sign} tingkat penghasilan (X_2) sebesar 0,027.

1) Tingkat Pendidikan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)

hipotesis secara parsial diketahui nilai t_{hitung} untuk tingkat pendidikan (X_1) sebesar 2,546. sedangkan nilai t_{tabel} dengan taraf nyata (α) sebesar 0,05 (5%) serta $df = n - k = 96$ adalah sebesar 1,66. Nilai $t_{hitung} 2,546 > t_{tabel} 1,66$ maka Hal ini secara hipotesis H_0 ditolak dan diterimanya H_a jadi secara parsial tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan kriteria pengujian nilai t_{sig} karena nilai $t_{sig} 0,012 < \text{nilai } 0,05$, jadi tingkat

pendidikan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Tingkat Penghasilan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)

Hipotesis secara parsial diketahui nilai t_{hitung} untuk tingkat penghasilan (X_2) sebesar 2,243. Sedangkan nilai t_{tabel} dengan taraf nyata (α) sebesar 0,05 (5%) serta $df = n - k = 96$ adalah sebesar 1,66. Nilai $t_{hitung} 2,243 > t_{tabel} 1,66$ maka hal ini secara hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima jadi secara parsial tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan kriteria pengujian nilai t_{sig} karena nilai $t_{sig} 0,027 < \text{nilai } 0,05$, jadi tingkat penghasilan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Tingkat Pendidikan (X_1) dan Tingkat Penghasilan (X_2) Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 (Y)

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diketahui nilai F_{hitung} diperoleh sebesar 7,180 lebih besar dari $F_{tabel} (2,70)$, hal ini juga diperkuat dengan nilai taraf signifikansi sebesar 0,001 atau signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, artinya H_0 ditolak, H_a diterima. hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat signifikansi yang kuat terjadi pada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Maka kesimpulannya tingkat pendidikan (X_1),

tingkat penghasilan (X_2) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 (Y).

Kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong masih rendah, diharapkan dengan dilakukan pemeriksaan terhadapnya dapat member motifasi positif agar pada masa selanjutnya menjadi lebih baik tingkat kepatuhannya. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak maka pendapatan Negara dibidang perpajakan akan meningkat.

Faktor yang menghambat pembayar pajak adalah masalah kepatuhan masyarakat. Untuk dapat mengukur kepatuhan wajib pajak, maka perlu diketahui variable-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pada penelitian ini digunakan variable tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variable-variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak.

Petugas penagih pajak seharusnya lebih bersosialisasi dan melakukan pendekatan secara langsung kepada masyarakat dalam hal memberikan penyuluhan terhadap arti pentingnya perpajakan di

indonesia, sehingga masyarakat akan lebih bersedia memenuhi ketentuan dan akan mematuhi aturan jika mereka memahami konsep dasar perpajakan.

Masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih di bawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya, tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya.

2. Pengaruh Tingkat Pendidikan (X_1) Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 (Y)

hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diketahui nilai t_{hitung} untuk variabel tingkat pendidikan (X_1) sebesar 2,546, sedangkan nilai t_{tabel} dengan taraf nyata (α) sebesar 0,05 (5%) serta $df = n - k = 96$ adalah sebesar 1,66. Jadi dapat disimpulkan bahwa $H_{02.1}$ ditolak dan $H_{a2.1}$ diterima karena, nilai t_{hitung} **2,546** > t_{tabel} **1,66**. Hal ini sejalan dengan diterimanya $H_{a2.1}$ dan ditolaknya $H_{02.1}$ serta nilai signifikansi X_1 lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,012, jadi dapat disimpulkan tingkat pendidikan

berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

Masyarakat yang pendidikannya tinggi tidak akan menemui kesulitan dalam hal arti pentingnya konsep dasar perpajakan, dan untuk masyarakat yang berpendidikan rendah inilah seharusnya petugas pajak harus lebih efektif lagi dalam bersosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan penyuluhan tentang arti pentingnya konsep dasar perpajakan di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ernawati (2014) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Tingkat Penghasilan (X_2) Secara Parsial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 (Y)

Hipotesis secara parsial diketahui nilai t_{hitung} untuk tingkat penghasilan (X_2) sebesar 2,243. Sedangkan nilai t_{tabel} dengan taraf nyata (α) sebesar 0,05 (5%) serta $df = n - k = 96$ adalah sebesar 1,66. Nilai $t_{hitung} 2,243 > t_{tabel} 1,66$ maka hal ini secara hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima jadi secara parsial tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan kriteria pengujian nilai t_{sig} karena nilai $t_{sig} 0,027 < \text{nilai } 0,05$, jadi tingkat penghasilan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih di bawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh

secara rutin. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya, tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya.

Hal ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Carolla Ditta Surya Putri menunjukkan bahwa tingkat penghasilan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan tentang tingkat pendidikan dan tingkat penghasilan masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) studi kasus pada kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang , maka peneliti menyimpulkan :

1. Hasil pengujian secara parsial berdasarkan pembuktian hipotesis dari persamaan regresi, peneliti dapat menyimpulkan :
 - a. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa tingkat pendidikan (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 (Y) adalah 0,117 atau 11,7%, berarti bahwa tingkat pendidikan (X_1) memiliki hubungan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 (Y), sedangkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diketahui nilai t_{hitung} untuk variabel tingkat pendidikan (X_1) sebesar 2,546, sedangkan nilai t_{tabel} dengan taraf nyata (α) sebesar 0,05 (5%) serta $df = n - k = 96$ adalah sebesar 1,66. Jadi dapat disimpulkan bahwa $H_{02.1}$ ditolak dan $H_{a2.1}$ diterima karena, nilai t_{hitung} **2,546** > t_{tabel} **1,66**. Hal ini sejalan dengan diterimanya $H_{a2.1}$ dan ditolaknya $H_{02.1}$ serta nilai signifikansi X_1 lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,012, jadi dapat disimpulkan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variable tingkat penghasilan (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 (Y) adalah sebesar 0,108 (10,8%), berarti bahwa tingkat penghasilan (X_2) memiliki hubungan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 (Y), yaitu sebesar nilai t_{hitung} untuk tingkat penghasilan (X_2) sebesar 2,243. Sedangkan nilai t_{tabel} dengan taraf nyata (α) sebesar 0,05 (5%) serta $df = n - k = 96$ adalah sebesar 1,66. Nilai $t_{hitung} 2,243 > t_{tabel} 1,66$ maka hal ini secara hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima jadi secara parsial tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan kriteria pengujian nilai t_{sig} karena nilai $t_{sig} 0,027 < \text{nilai } 0,05$, jadi tingkat penghasilan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Hasil pengujian secara simultan berdasarkan dari pembuktian hipotesis, maka peneliti dapat menyimpulkan:

Nilai F_{hitung} diperoleh sebesar 7,180 lebih besar dari $F_{tabel} (2,70)$, hal ini juga diperkuat dengan nilai taraf signifikansi sebesar 0,001 atau signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, artinya H_0 ditolak, H_a diterima. hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat signifikansi yang kuat terjadi pada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Maka kesimpulannya tingkat pendidikan (X_1), tingkat penghasilan (X_2) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 (Y).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.
 - a. Peningkatan intensitas penyuluhan perpajakan atau PBB-P2 di seluruh daerah dan lapisan masyarakat, yang berfokus pada faktor kesadaran, pemahaman, persepsi dan sikap wajib pajak PBB-P2. Sehingga dengan sendirinya akan menimbulkan kepatuhan wajib pajak tanpa adanya pemaksaan darisesuatu atau siapapun, dan akhirnya akan meningkatkan keberhasilan penerimaan PBB-P2 Kota Kota Palembang.
 - b. Mampu memberikan fasilitas dan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak atau masyarakat sehingga wajib pajak atau masyarakat mempunyai kesadaran, pemahaman, persepsi dan sikap dalam membayar pajak dengan baik dan tepat waktu.
 - c. Mempertegas penerapan sanksi denda dan hukum terhadap pajak daerah
2. Bagi Wajib Pajak

Untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, persepsi dan sikap perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak negara, yang nantinya juga dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat seperti biaya pembangunan dan pemerintahan.

Penelitian di bidang perpajakan diperlukan dalam membuat kebijakan-kebijakan perpajakan, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Penelitian selanjutnya yang terkait dengan penelitian PBB-P2,

disarankan untuk menambah jumlah sampel, menyempurnakan metode analisis statistik yang digunakan dan / atau kuesionernya, penetapan lokasi penelitian di tempat lain, atau pengulangan di tempat yang sama dan menambah jumlah variabel yang dapat berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan PBB-P2.

DAFTAR PUSTAKA

- Carolla Ditta Surya Putri. 2013. *Analisis Pengaruh Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, Dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan PBB Masyarakat Desa Dan Kota Dengan Variabel Moderating Kontrol Petugas Desa/Kelurahan (Studi kasus Pada Kabupaten Demak)*. Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013, Halaman 1-11 ([Http://Ejournal-SI.Undip.Ac.Id/Index.Php/Accounting](http://Ejournal-SI.Undip.Ac.Id/Index.Php/Accounting) Issn (Online): 2337-3806 di akses tanggal 15 januari 2015)
- Direkorat Jenderal Pajak. 2009. *Pajak Penghasilan*. Jakarta. Undang-undang No36
- Laily Fauziah. 2008. *Pengaruh Karakteristik pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan PBB Jakarta Selatan Satu)*. Universitas Negeri Sayrif Hidayatullah. Article (online), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/6087/1/LAILY%FAUZIAH-FEB.pdf>, diakses 26 Desember 2014).
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Cv. Andi Offset.
- Nur Indrianto dan Bambang Supomo. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Program Strata Satu. 2011. *Pedoman Pelatihan Usulan Penelitian Dan skripsi*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Resmi, Siti. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta. 2007
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 1 Angka 1 sebagaimana disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.



SURAT PENGANTAR KUESIONER

Palembang, Juli 2015

Para Responden yang Terhormat,

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas ketersediaan Bapak/Ibu mengisi lembar kuesioner ini.

Adapun kami sampaikan bahwa kuesioner ini dibuat oleh :

Nama : REZA DARMAWAN
 NIM : 22 2011 321
 Fakultas : Akuntansi
 Jurusan : Ekonomi dan Bisnis
 Universitas : Muhammadiyah Palembang

Kuesioner ini merupakan bagian dari proses pengumpulan data untuk keperluan tugas akhir/skripsi kami yang berjudul **“Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Tingkat Penghasilan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) (Studi Kasus Pada Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang) “**.

Jawaban yang anda berikan tidak akan dinilai sebagai benar atau salah karena apa yang menjadi kebenaran adalah sesuai apa yang anda rasakan dan yakini. Data yang kami peroleh akan kami rahasiakan dan tidak akan kami sebar luaskan, karena hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian penelitian ini saja.

Atas kerjasama dan kesediaan Bapak/Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Dengan Hormat,

(REZA DARMAWAN)

NIM : 222011321

BIODATA/IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Usia : Tahun
3. Jenis Kelamin : ☐ Pria ☐ Wanita
4. Pendidikan terakhir : ☐ SD, SMP, SMA
☐ D1, D2, D3
☐ S1, S2, S3
5. Penghasilan Perbulan : ☐ < Rp 2.500.000 – Rp. 5.000.000
☐ Rp 6.000.000 – Rp 10.000.000
☐ > Rp. 10.000.000

Petunjuk Pengisian Kuesioner :

Bapak/ibu/saudara/i cukup memberikan tanda check list (✓) pada alternatif jawaban yang tersedia sesuai pendapat Bapak/ibu/saudara/i. Setiap pertanyaan mengharapkan ada satu jawaban. Setiap angka akan mewakili kesesuaian dengan pendapat Bapak/ibu/saudara/i. Skor/nilai jawaban adalah sebagai berikut :

Tidak Setuju = TS = 1

Ragu- Ragu = RR = 2

Setuju = S = 3

A. KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

NO	Item Pertanyaan	TS	RR	S
1	Saya selalu tepat waktu dalam menyampaikan SPT tahunan dalam setiap tahunnya			
2	Sebagai wajib pajak, saya tidak pernah melakukan penunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk menunda pembayaran pajak dari kantor pajak			
3	Saya tidak pernah dijatuhkan sanksi pidana dan tidak pernah melakukan tindak kejahatan dibidang perpajakan			

REKAP JAWABAN RESPONDEN

RESP.	PENDIDIKAN (X1)	PENGHASILAN (X2)	KAPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)
1	3	2	9
2	3	1	9
3	1	2	8
4	3	1	9
5	3	2	9
6	1	1	8
7	2	1	9
8	1	1	8
9	3	1	9
10	3	2	9
11	3	2	9
12	3	2	9
13	1	1	6
14	2	2	9
15	3	2	9
16	3	1	8
17	1	1	9
18	3	3	9
19	1	1	9
20	3	2	9
21	1	1	9
22	2	1	8
23	3	2	9
24	1	1	9
25	1	1	8
26	3	1	9
27	1	1	9
28	2	2	9
29	2	1	9
30	3	1	9
31	2	1	9
32	1	1	9
33	3	2	9
34	2	1	8
35	3	1	9
36	2	1	9
37	2	3	9
38	2	2	9
39	3	1	9
40	3	2	9
41	3	1	9

RESP.	PENDIDIKAN (X1)	PENGHASILAN (X2)	KAPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)
42	1	1	9
43	1	1	9
44	3	1	7
45	2	2	9
46	3	2	9
47	1	1	8
48	3	1	9
49	1	1	8
50	2	2	9
51	2	3	9
52	3	1	9
53	3	1	9
54	2	2	9
55	3	1	9
56	2	3	9
57	1	3	9
58	2	2	9
59	1	1	8
60	3	1	9
61	3	3	9
62	2	2	9
63	1	1	9
64	3	1	9
65	1	1	9
66	3	1	9
67	2	2	9
68	1	1	8
69	1	1	9
70	3	2	9
71	2	1	9
72	2	2	9
73	3	1	9
74	1	1	8
75	1	1	9
76	3	2	9
77	3	1	8
78	3	3	9
79	3	1	9
80	1	1	9
81	3	1	9
82	1	1	9
83	2	2	9
84	3	1	7

RESP.	PENDIDIKAN (X1)	PENGHASILAN (X2)	KAPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)
85	2	1	9
86	2	1	9
87	3	3	9
88	2	2	9
89	3	1	9
90	1	1	4
91	2	2	9
92	2	2	9
93	3	1	9
94	1	1	8
95	3	3	9
96	1	1	8
97	3	1	9
98	2	2	8
99	1	3	9

REKAP JAWABAN RESPONDEN

RESP.	PENDIDIKAN (X1)	PENGHASILAN (X2)	KAPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)
1	3,0801	2,3448	3,587
2	3,0801	1,0000	3,587
3	1,0000	2,3448	2,971
4	3,0801	1,0000	3,587
5	3,0801	2,3448	3,587
6	1,0000	1,0000	2,963
7	1,9921	1,0000	3,587
8	1,0000	1,0000	2,900
9	3,0801	1,0000	3,587
10	3,0801	2,3448	3,587
11	3,0801	2,3448	3,587
12	3,0801	2,3448	3,587
13	1,0000	1,0000	1,661
14	1,9921	2,3448	3,587
15	3,0801	2,3448	3,587
16	3,0801	1,0000	2,971
17	1,0000	1,0000	3,587
18	3,0801	3,3851	3,587
19	1,0000	1,0000	3,587
20	3,0801	2,3448	3,587
21	1,0000	1,0000	3,587
22	1,9921	1,0000	2,900
23	3,0801	2,3448	3,587
24	1,0000	1,0000	3,587
25	1,0000	1,0000	2,963
26	3,0801	1,0000	3,587
27	1,0000	1,0000	3,587
28	1,9921	2,3448	3,587
29	1,9921	1,0000	3,587
30	3,0801	1,0000	3,587
31	1,9921	1,0000	3,587
32	1,0000	1,0000	3,587
33	3,0801	2,3448	3,587
34	1,9921	1,0000	2,900
35	3,0801	1,0000	3,587
36	1,9921	1,0000	3,587
37	1,9921	3,3851	3,587
38	1,9921	2,3448	3,587
39	3,0801	1,0000	3,587
40	3,0801	2,3448	3,587
41	3,0801	1,0000	3,587

RESP.	PENDIDIKAN (X1)	PENGHASILAN (X2)	KAPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)
42	1,0000	1,0000	3,587
43	1,0000	1,0000	3,587
44	3,0801	1,0000	2,347
45	1,9921	2,3448	3,587
46	3,0801	2,3448	3,587
47	1,0000	1,0000	2,971
48	3,0801	1,0000	3,587
49	1,0000	1,0000	2,900
50	1,9921	2,3448	3,587
51	1,9921	3,3851	3,587
52	3,0801	1,0000	3,587
53	3,0801	1,0000	3,587
54	1,9921	2,3448	3,587
55	3,0801	1,0000	3,587
56	1,9921	3,3851	3,587
57	1,0000	3,3851	3,587
58	1,9921	2,3448	3,587
59	1,0000	1,0000	2,971
60	3,0801	1,0000	3,587
61	3,0801	3,3851	3,587
62	1,9921	2,3448	3,587
63	1,0000	1,0000	3,587
64	3,0801	1,0000	3,587
65	1,0000	1,0000	3,587
66	3,0801	1,0000	3,587
67	1,9921	2,3448	3,587
68	1,0000	1,0000	2,963
69	1,0000	1,0000	3,587
70	3,0801	2,3448	3,587
71	1,9921	1,0000	3,587
72	1,9921	2,3448	3,587
73	3,0801	1,0000	3,587
74	1,0000	1,0000	2,963
75	1,0000	1,0000	3,587
76	3,0801	2,3448	3,587
77	3,0801	1,0000	2,971
78	3,0801	3,3851	3,587
79	3,0801	1,0000	3,587
80	1,0000	1,0000	3,587
81	3,0801	1,0000	3,587
82	1,0000	1,0000	3,587
83	1,9921	2,3448	3,587
84	3,0801	1,0000	2,347

RESP.	PENDIDIKAN (X1)	PENGHASILAN (X2)	KAPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)
85	1,9921	1,0000	3,587
86	1,9921	1,0000	3,587
87	3,0801	3,3851	3,587
88	1,9921	2,3448	3,587
89	3,0801	1,0000	3,587
90	1,0000	1,0000	1,000
91	1,9921	2,3448	3,587
92	1,9921	2,3448	3,587
93	3,0801	1,0000	3,587
94	1,0000	1,0000	2,971
95	3,0801	3,3851	3,587
96	1,0000	1,0000	2,963
97	3,0801	1,0000	3,587
98	1,9921	2,3448	2,900
99	1,0000	3,3851	3,587

Correlations

Correlations

		p1	p2	p3	TOTAL
p1	Pearson Correlation	1	,518**	,254*	,819**
	Sig. (2-tailed)	.	,000	,011	,000
	N	99	99	99	99
p2	Pearson Correlation	,518**	1	,271**	,817**
	Sig. (2-tailed)	,000	.	,007	,000
	N	99	99	99	99
p3	Pearson Correlation	,254*	,271**	1	,611**
	Sig. (2-tailed)	,011	,007	.	,000
	N	99	99	99	99
TOTAL	Pearson Correlation	,819**	,817**	,611**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	.
	N	99	99	99	99

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,623	3

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
p1	2,89	,347	99
p2	2,90	,335	99
p3	2,93	,258	99

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
p1	5,83	,225	,503	,415
p2	5,82	,232	,518	,391
p3	5,79	,353	,301	,682

Frequency Table

p1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	89	89,9	89,9	89,9
	Ragu-ragu	9	9,1	9,1	99,0
	Tidak Setuju	1	1,0	1,0	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

p2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	90	90,9	90,9	90,9
	Ragu-ragu	8	8,1	8,1	99,0
	Tidak Setuju	1	1,0	1,0	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

p3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Setuju	92	92,9	92,9	92,9
	Ragu-ragu	7	7,1	7,1	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Pendidikan (X1)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD, SMP, SMA	29	29,3	29,3	29,3
	D1, D2, D3	27	27,3	27,3	56,6
	S1, S2, S3	43	43,4	43,4	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Penghasilan (X2)

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< Rp. 2.500.000 - Rp. 5.000.000	60	60,6	60,6	60,6
	Rp. 6.000.000 - Rp. 10.000.000	29	29,3	29,3	89,9
	> Rp. 10.000.000	10	10,1	10,1	100,0
	Total	99	100,0	100,0	

Regression

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,361 ^a	,130	,112	,393139

a. Predictors: (Constant), Penghasilan (X2), Pendidikan (X1)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,219	2	1,110	7,180	,001 ^a
	Residual	14,838	96	,155		
	Total	17,057	98			

a. Predictors: (Constant), Penghasilan (X2), Pendidikan (X1)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	2,982	,121	
	Pendidikan (X1)	,117	,046	,247
	Penghasilan (X2)	,108	,048	,218

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,982	,121		24,670	,000
	Pendidikan (X1)	,117	,046	,247	2,546	,012
	Penghasilan (X2)	,108	,048	,218	2,243	,027

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027/SK/BAN-PT/Akred/PT/I/2014
Nomor : 044/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2014
Nomor : 044/SK/BAN-PT/Ak-XIII/S1/II/2011
Nomor : 005/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/VI/2010

(B)
(B)
(B)
(B)

bsite: fe.umpalembang.ac.id

Email : febumpg@umpalembang.ac.id

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711) 511433 Faximile (0711) 518018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Rabu, 05 Agustus 2015
Waktu : 08.00 s/d 12.00 WIB
Nama : Reza Darmawan
NIM : 22 2011 321
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Skripsi : PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN TINGKAT PENGHASILAN MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN (PBB-P2) (Studi Kasus pada Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang)

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	M. Orba Kurniawan, S.E., SH., M.Si	Pembimbing	3/9/2015	
2	M. Orba Kurniawan, S.E., SH., M.Si	Ketua Penguji	3/9/2015	
3	Mizan, S.E., M.Si., Ak., CA	Penguji I	2/9 - 2015	
4	Nina Sabrina, S.E., M.Si	Penguji II	3/8 - 2015	

Palembang, Agustus 2015

Dekan
r.b Ketua Program Studi Akuntansi



Rosalina Ghozali, SE, Ak, M.Si

NIDN/NBM : 0228115802/1021960



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
KANTOR CAMAT ILIR BARAT II
JALAN AKBP AGUSTJIK No.1050 32 ILIR TELP. 351659
PALEMBANG 30145

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR : 070/ 193 / IB-II / 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **A.HALIM MACHMUD,SE,MM**
NIP : 19631123198609 1 001
abatan : Camat Ilir Barat II Kota Palembang

Menyatakan bahwa Mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah yaitu :

Nama : **REZA DARMAWAN**
NIM : 222012321
Program Studi : Ilmu Ekonomi dan Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Penghasilan Wajib Pajak terhadap Kesadaran Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2)
(Studi Kasus Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang)

Mahasiswa dari FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTA PALEMBANG Telah melakukan penelitian di Kecamatan Ilir Barat II pada tanggal .9 Juli 2015 s/d. 1 September 2015 dengan **Baik**
Demikian agar dipergunakan sebagai mana mestinya





**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Unggul dan Islami

Sertifikat

298/J-10/FEB-UMP/SHA/VII/2015

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : REZA DARMAWAN
NIM : 222011321
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan **HAFAL / TAHFIDZ** (22) Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 08 Juli 2015
an. Dekan



Drs. Antoni, M.H.I.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

STATUS TERAKREDITASI

PIAGAM

No.259/H-4/LPKKN/UMP/IX/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa :

Nama : Reza Darmawan
Nomor Pokok Mahasiswa : 22 2011 321
Fakultas : Ekonomi
Tempat Tgl. Lahir : Palembang, 24-12-1993

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-7 yang dilaksanakan dari tanggal 16 Juli sampai dengan 2 September 2014 bertempat di:

Kelurahan/Desa : Langkan
Kecamatan : Banyuasin III
Kota/Kabupaten : Banyuasin
Dinyatakan : LULUS

Mengetahui
Rektor


Dr. H. M. Idris, S.E., M.Si.
REKTOR



Palembang, 15 September 2014
Ketua LPKKN,


Ir. Alhanannasir, M.Si.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
LABORATORIUM BAHASA

Jl. Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang Telp. (0711) 512637

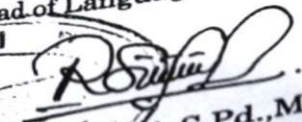
TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Reza Darmawan
Place/Date of Birth : Palembang, December 24th, 1993
Test Times Taken : +2
Test Date : February 18th, 2015

Scaled Score

Listening Comprehension : 52
Structure Grammar : 42
Reading Comprehension : 48
OVERALL SCORE : 473

Palembang, March 5th, 2015
Head of Language Laboratory


Rini Susanti, S.Pd., M.A.
NBM/NIDN. 1164932/0210098402



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Reza Darmawan	PEMBIMBING
NIM : 22 2011 321	KETUA : M. Orba Kurniawan, S.E., SH., M.Si
PROGRAM STUDI : Akuntansi	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Tingkat Penghasilan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2)	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	12/7 2015	Bab I & II			Ace
2		Bab III & IV			perbami
3					
4	27/7 2015	Bab III			Ace
5		Bab IV & V			perbami
6					
7	28/7 2015	Bab IV			Ace
8		Bab V			perbami
9					
10	29/7 2015	Bab V			Ace
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : / /

a.n. Dekan

Program Studi

Rosalina Ghozali, S.E., Ak., M.Si





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
LABORATORIUM BAHASA

Jl. Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang Telp. (0711) 512637

TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Reza Darmawan
Place/Date of Birth : Palembang, December 24th, 1993
Test Times Taken : +2
Test Date : February 18th, 2015

Scaled Score

Listening Comprehension : 52
Structure Grammar : 42
Reading Comprehension : 48
OVERALL SCORE : 473

Palembang, March 5th, 2015

Head of Language Laboratory


Rini Susanti, S.Pd., M.A.
NBM/NIDN. 1164932/0210098402

Regression

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,361 ^a	,130	,112	,393139

a. Predictors: (Constant), Penghasilan (X2), Pendidikan (X1)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,219	2	1,110	7,180	,001 ^a
	Residual	14,838	96	,155		
	Total	17,057	98			

a. Predictors: (Constant), Penghasilan (X2), Pendidikan (X1)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	2,982	,121	
	Pendidikan (X1)	,117	,046	,247
	Penghasilan (X2)	,108	,048	,218

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2,982	,121		24,670	,000
	Pendidikan (X1)	,117	,046	,247	2,546	,012
	Penghasilan (X2)	,108	,048	,218	2,243	,027

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

BIODATA PENULIS

Nama : Reza Darmawan

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 24 Desember 1993

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Komplek Sukarami Patra Permai Blok P15

Pekerjaan : Mahasiswa.

Nama Orang Tua

1. Ayah : Didi Syarif

2. Ibu : Dahlia Sahro

Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Karyawan Swasta

2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang Tua : Komplek Sukarami Patra Permai Blok p15